

DNA SASTRA BANGSA INDONESIA DARI BARUS: PRAKTIK PERENCANAAN BAHASA TERANGKAI (*JOINT LANGUAGE PLANNING*)

Maryanto

(Widyabasa Ahli Madya/Penghayat Trigatra Bangun Bahasa)
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kemendikdasmen
maryantobahasa@gmail.com

ABSTRAK

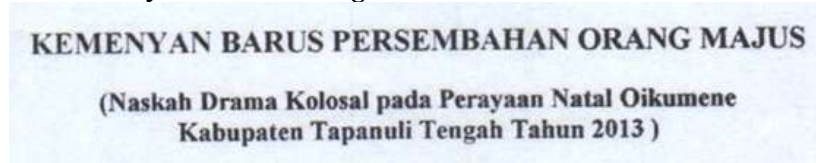
Makalah ini bertujuan untuk menawarkan jawaban alternatif dengan pendekatan eksplanatori terhadap isu krusial dalam kebijakan bahasa di Indonesia, yaitu praktik yang oleh Charlie Hanawalt (2010) disebut sebagai *joint language planning* (*perencanaan bahasa terangkai*). Pendekatan ini tercermin dalam semangat/spirit gerakan nasional-kebahasaan yang mendorong kerangka kerja perencanaan bahasa tiga dimensi: *trigatra bangun bahasa*. Kerangka ini menekankan tiga seruan: (1) *utamakan bahasa Indonesia*; (2) *lestarikan bahasa daerah*; dan (3) *kuasai bahasa asing*. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat persoalan yang cukup mendasar. Bahasa Indonesia, yang dianggap sebagai varian dari bahasa Melayu di Selat Malaka, belum terhubung secara memadai dengan lintasan historis bahasa dan kesusastraan Melayu, khususnya yang berasal dari kota pelabuhan kuno, Barus, di Sumatra Utara. Keterputusan sejarah ini menghambat upaya untuk mendudukkan bahasa Indonesia secara fungsional baik sebagai bahasa nasional maupun internasional—terutama dalam konteks pembinaan bahasa negara dan internasionalisasi bahasa Indonesia di kawasan ASEAN. Makalah ini menawarkan jawaban alternatif dengan menghadirkan catatan historis yang didasarkan pada data kualitatif yang dikumpulkan dari sejarah *lingua franca* Indonesia, khususnya pada masa globalisasi purba dalam perdagangan kamper/kapur barus. Dengan menelusuri jejak linguistik dan literasi bahasa Indonesia hingga ke Barus sebagai titik balik arus peradaban Nusantara (hingga abad XVI), studi ini berupaya mengungkap ‘DNA’ sastra bangsa Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi ilmiah untuk praktik perencanaan bahasa terangkai pada masa mendatang di Indonesia.

Kata kunci: *sastra Indonesia, bahasa Indonesia, dan kamper/kapur barus*

PENDAHULUAN

Barus merupakan sebuah episentrum pertumbuhan *lingua franca* bagi bangsa Indonesia dengan materi genetik/DNA¹ tertentu dalam kehidupan berbahasa secara majemuk (multilingual). Ini adalah karena jejak Barus (sekarang, sebuah kecamatan di Tapanuli Tengah) sebagai pusat perdagangan antar-bangsa, terutama untuk perniagaan komoditas kemenyan dan kapur barus/kamper yang diketahui pergerakannya *sangat purba* di Indonesia. Untuk itu, bukti kebahasaan dapat diperoleh dari pengetahuan: (1) ihwal kemenyan barus yang dikisahkan di kalangan agama Nasrani dan (2) perihal kapur barus yang diceritakan di kalangan agama Islam.

¹ Singkatan DNA dipinjam dari bidang ilmu kedokteran (asam deoksiribonukleat/*deoxyribonucleic acid*) dengan merujuk konsep dasarnya pada ihwal materi genetik yang dibawa oleh makhluk hidup, termasuk insan/manusia Indonesia dengan jejak genetik-kebahasaannya di Barus. Kolaborasi antara pakar bidang ilmu kedokteran dan kebahasaan/linguistik telah menghasilkan cabang ilmu genolinguistik (Mahsun, 2010) untuk melakukan pengelompokan bahasa dan populasi penuturnya. Dengan analogi adanya jejak DNA dalam pergerakan manusia di Barus, populasi penutur bahasa Indonesia dapat dikelompokkan melalui identitas berkebangsaan Indonesia dengan memanfaatkan data kebahasaan dari fakta kehidupan dalam kesusastraan Melayu Barus. Berdasarkan teori sosiolinguistik *diglosia* (Ferguson, 1959), unsur kebahasaan dalam kesusastraan Melayu Barus ini sangat bermanfaat untuk melakukan pembedaan, tetapi tidak untuk pemisahan, antara varietas tinggi (H) dan varietas rendah (L), yaitu antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah Melayu yang keduanya secara genetik berkerabat dekat. Kedekatan keduanya itu terhubung melalui rekonstruksi bahasa (purba) Austronesia. Pada era globalisasi purba, Barus merupakan titik balik arus peradaban Nusantara ke arah timur (dari Indonesia barat) setelah terjadi perjumpaan penutur bahasa Indonesia/Melayu dengan penutur bahasa yang kekerabatannya tidak dekat (penutur bahasa asing).

(1) *Kisah kemenyan baru tentang kelahiran Yesus*(2) *Cerita kapur baru tentang kematian dan jenazah*

[...] “Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur **kapur baru** atau sedikit **kapur baru**. Jika kalian sudah selesai, biarkanlah aku (Nabi) masuk.” [...] (HR. Bukhari No. 1258, Muslim No. 939).

Dua kalangan agama terbesar—Nasrani dan Islam—telah memasukkan Barus dalam kisah/cerita keagamaannya. Hikmah dari kisah/cerita keagamaan yang bersumber dari Barus berkisar pada kehidupan, baik pada hari kelahiran maupun hari kematian manusia. Bahkan, untuk mengetahui kehidupan pasca-dunia, kitab suci Al-Qur’an (Al-Insan: 5) juga mencatat kosakata khas bahasa Indonesia ini. Dalam kisah kehidupan di akhirat, dinyatakan bahwa sesungguhnya, orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur/kapur (barus).² Pada abad VII, agama Islam diketahui telah mulai tersebar luas ke Nusantara melalui pusat perdagangan di Barus.

Perkembangan *lingua franca* melalui perdagangan di Barus pun berdampak luas dalam bidang (ilmu) pengetahuan keagamaan. Pada abad XVI, bahasa Melayu yang berkembang dari Barus mencapai puncak status yang oleh Abdul Hadi W.M. (2002) dinyatakan sebagai “bahasa pergaulan utama penduduk kepulauan Nusantara di bidang perdagangan, keagamaan, dan intelektual.” Hamzah Fansuri—Hamzah dari Barus—diakui di dunia kesusastraan sebagai pencipta pertama syair Melayu (Teeuw, 1994). Puisinya dengan empat baris bersajak seperti contoh berikut digemari oleh sastrawan Nusantara sejak abad XVII.

Hamzah Fansuri di negeri Melayu
Tempatnya kapur di dalam kayu
Asalnya manikam di manakan layu
Dengan ilmu dunia di manakan payu

(dikutip dari Ikatan-Ikatan XV dalam Abdul Hadi W.M., 2002; 2020)

Persoalan linguistis muncul dari fakta pergerakan sosial dengan adanya perjumpaan awal antara para pendahulu bangsa Indonesia dan bangsa lain pada masa silam di kota kuno Barus tersebut. Dalam kaitan dengan pertumbuhan *lingua franca* bangsa Indonesia itu, dua butir soal linguistis berikut teridentifikasi kemunculannya pada hari ini di awal abad XXI.

- a. Bagaimana perencanaan status bahasa Indonesia dapat dipraktikkan sekarang, baik sebagai bahasa persatuan bangsa (1928) maupun bahasa resmi negara (1945)?
- b. Apa pula hubungan pendasaran bahasa (persatuan) Indonesia dengan bahasa daerah, pada satu sisi, dan dengan bahasa asing, pada sisi lainnya?

Sangat menarik persoalan kebahasaan itu karena praktik perencanaan bahasa terangkai/*joint language planning* (dalam istilah Charlie Hanawalt, 2010) bertautan dengan jejak genetik-kehidupan/DNA manusia dalam hal berbahasa (di) Indonesia. Di Indonesia, memang, amat rumit keterangkaian semua masalah berbahasa. Kerumitan ini terjadi tidak hanya dalam hal berbahasa nasional dan lokal seperti dalam kertas kerja Charlie Hanawalt pada 2010 ketika berlangsung Simposium Internasional Perencanaan Bahasa di Jakarta dengan tema “Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan”.

² Ustaz Adi Hidayat mengungkapkan satu fakta penting mengenai bahasa Indonesia di dalam Al-Qur’an.

Pengungkapan fakta ini dimuat dalam laman

(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6X3vaBETihs&ved=2ahUKEwjzIjo9tGMAxWIXWwGHTUMMr8Qz40FegQIHhAU&usg=AOvVaw36hr_ddX1fwgt4UPRGNcxT).

Sebuah tantangan kebahasaan pada abad ke-21 ini ialah bahwa dua jenis bahasa—bahasa Indonesia dan bahasa daerah—belum terhubung dengan jejak sejarah awal kehidupan populasi penuturnya berabad-abad silam di Barus. Dua jenis bahasa itu juga belum terangkai dengan ihwal berbahasa asing di titik pusat atau episentrum pertumbuhan lingua franca itu. Sementara itu, dalam hal perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, sekarang secara paripurna telah terbentuk spirit gerakan *trigatra bangun bahasa*.

Melalui praktik perencanaan bahasa terangkai ini, spirit pembangunan sumber daya pada populasi manusia Indonesia terdiri atas tiga unsur gerakan: *utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; (dan) kuasai bahasa asing*. Tantangan terbesarnya ialah bagaimana populasi manusia Indonesia dibangun agar setiap insannya mampu mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah serta menguasai bahasa asing. Lebih lanjut, spirit gerakan *trigatra bangun bahasa* tersebut baru-baru ini dimuat di dalam dokumen Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia (Pasal 6). Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, salah satu bentuk pengawasan penggunaan bahasa Indonesia adalah sosialisasi yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif guna memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap kaidah berbahasa Indonesia. Untuk itulah sosialisasi dilakukan melalui gerakan *trigatra bangun bahasa*.

Ketika diperagakan dalam bentuk program kegiatan sosialisasi pengawasan penggunaan bahasa Indonesia tersebut, spirit *trigatra bangun bahasa* terlihat sangat khas dari gerakan tangan. Berikut adalah gerakan tangan pada saat mengucapkan seruan *utamakan bahasa Indonesia*.



Gerakan ini menunjukkan spirit keyakinan atau kebenaran ilahiah atas penciptaan umat manusia yang berbangsa (satu) Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt.). Bahasa Indonesia diutamakan untuk menggalang semangat *persatuan Indonesia* sebagaimana diserukan dalam lirik lagu kebangsaan “Indonesia Raya” (pada stanza I: *marilah kita berseru Indonesia bersatu*). Persatuan Indonesia digalang secara terus-menerus demi terwujudnya cita-cita lebih lanjut, yaitu “Indonesia bahagia” pada stanza II dan “Indonesia abadi” pada stanza III (Lampiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Selanjutnya, berikut adalah gerakan tangan pada saat mengucapkan seruan *lestarikan bahasa daerah*.



Gerakan ini menunjukkan spirit keyakinan atau kebenaran ilahiah atas penciptaan umat manusia Indonesia tersebut dengan berawal dari suku-suku bangsa yang berciri khas dalam bahasa daerah kesukuan masing-masing untuk dilestarikan secara terus-menerus oleh masyarakat penuturnya. Penutur/pemilik bahasa ini dilindungi setiap haknya oleh negara dalam mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah *sebagai sarana pendukung bahasa Indonesia* (sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014). Pelestarian bahasa daerah diupayakan tidak hanya untuk mencegah hilangnya jati diri bangsa Indonesia, tetapi juga untuk memantapkan kebinekatunggalikaan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, berikut adalah gerakan tangan pada saat mengucapkan seruan *kuasai bahasa asing*.



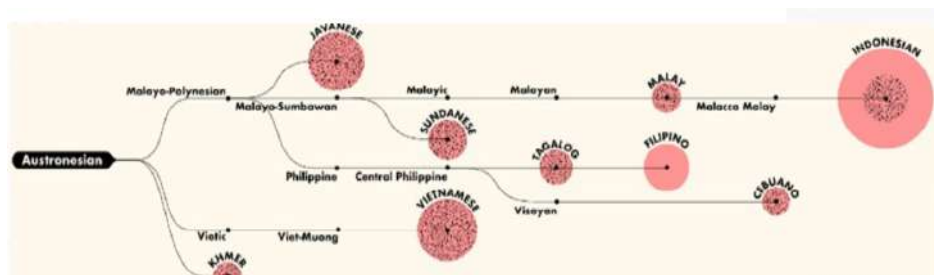
Gerakan ini menunjukkan spirit keyakinan/kebenaran ilahiah akan penciptaan umat manusia di muka bumi, secara khusus di atau dari luar Indonesia, dengan ciri khas bahasa kebangsaan masing-masing yang juga dikenal, diakui, dan dihormati kekhasannya sebagai bahasa asing. Bahasa asing harus dikuasai dengan sungguh-sungguh dalam semua hal bahasa selain yang disebut sebagai bahasa Indonesia dan daerah (sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Kesanggupan atau kemampuan berbahasa asing yang diraih oleh warga bangsa Indonesia diperlukan untuk mengembangkan wawasan kebinekaan global yang menentukan pentingnya kerja sama antar-bangsa guna menjadi sesama makhluk penghuni bumi.

Spirit *trigatra bangun bahasa* dapat memberikan keyakinan/kebenaran ilahiah bahwa semua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa asing) merupakan entitas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt.). Setiap ciptaan Sang Maha Kuasa ini diyakini keberadaannya masing-masing melekat tanpa berjarak (bersifat ‘khulki’ dalam pengertian leksikal pada Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) dengan insan/manusia sebagai pemilik/penutur bahasa yang berkarakter.

Keyakinan/kebenaran seperti ini dapat diperoleh dari kisah tentang penciptaan manusia pertama (Adam) di muka bumi oleh Allah Swt., sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Qur’an (Al-Baqarah: 30—34). Kisah penciptaan manusia tersebut menceritakan bahwa pada akhirnya, setelah mengetahui kemampuan Adam dalam suatu bahasa yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan untuk menyebutkan nama-nama benda, para malaikat sudi bersujud hormat atas tugas kekhalifan manusia dari Allah di muka bumi.

Di muka bumi, yang sebagian belahannya bernama Indonesia, terciptalah umat manusia dengan pengakuan atau tekad atau ikrar untuk bertumpah darah/bertanah air dan berbangsa (satu) Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928). Tentunya, keterhubungan antara bahasa (persatuan) Indonesia dan bahasa yang dituturkan oleh Adam di hadapan para malaikat atas perintah Tuhan tersebut akan sulit dibuktikan secara ilmiah. Jembatan pengetahuan umum untuk pembuktian itu terdapat juga dalam kitab suci Al-Qur’an (Al-Hujurat: 13). Di dalam kitab suci itu dinyatakan bahwa setelah diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (Adam dan Hawa), dijadikanlah manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.

Untuk memperoleh pengetahuan akademis tentang seluk beluk bahasa (persatuan) Indonesia melalui jejak genetik-kehidupan/DNA manusia yang berbangsa Indonesia, pembuktian ilmiah telah banyak dilakukan. Temuan ilmiah sementara ini menunjukkan keyakinan/kebenaran atas adanya jejak manusia Austronesia pada zaman purba sebagai sumber kehidupan awal bersatunya (bangsa) Indonesia. Berikut adalah gambar yang mengilustrasikan jejak asal mulanya bahasa Indonesia atau yang tertulis namanya “Indonesian” dalam bahasa (asing) Inggris (<https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/>).



Gambar/peta kebahasaan di atas diambil dari laporan hasil survei seratus bahasa yang berpenutur terbanyak sedunia (Imam Gosh, 15 Februari 2020). Hasil survei itu melaporkan bahwa bahasa Indonesia menduduki peringkat kesepuluh dengan catatan sumber kemuasalannya dari bahasa Austronesia. Dilaporkan pula bahwa bahasa Indonesia adalah mirip dalam hal perencanaan pemerolehannya dengan bahasa Swahili yang mencapai angka penuturan 82% sebagai bahasa kedua. Dengan angka penuturan 78% sebagai bahasa kedua dari total keseluruhan sekitar 200 juta penutur, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang secara spesifik disebutkan *Melayu (Selat) Malaka*: “[...] *this variation on the Malay language has been used as the lingua franca across the islands for a long time*”.

Makalah ini tidak secara khusus membahas ihwal perencanaan bahasa dari aspek pemerolehannya. Alih-alih perencanaan pemerolehan (*acquisition planning*), pembahasan makalah ini lebih difokuskan pada penetapan status (*status planning*). Untuk itu, terlebih dahulu, perlu disampaikan di sini bahwa perencanaan status bahasa Indonesia—dalam ihwal bahasa persatuan bangsa—dipelopori atau digerakkan lebih awal oleh Mohammad Tabrani Soerjowitjito pada 1926. Pada saat itu, kondisi kehidupan sosial dalam hal hubungan antara bangsa dan bahasa Indonesia diungkap oleh M. Tabrani sebagai berikut.

Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itoe!
Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itoe!

Pernyataan mengenai ketiadaan bangsa dan bahasa Indonesia itu dilontarkan dalam artikel seminal dengan judul “Bahasa Indonesia” pada kolom tajuk rencana koran *Hindia Baroe* (edisi 11 Februari 1926: dokumentasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Berikut adalah judul artikel tersebut beserta catatan “Motto” yang tertera atau tercantum sebagai semboyan, pedoman, atau prinsip berbahasa Indonesia.

BAHASA INDONESIA.
Motto. Satoe bangsa jang ta' mempoenjai bahasa gampang dihantjoerkan. Karena bahasa itoe adalah pertalian jang tegoeh dan koeat.

Perlu juga dicatat di sini bahwa seruan/gerakan penerbitan bahasa (persatuan) bangsa Indonesia diikuti dengan kesadaran penuh dari M. Tabrani akan pentingnya keberadaan bahasa asing. Bahasa asing dimaksud ialah bahasa Belanda yang diakuinya telah memberikan pertolongan untuk membuka ilmu pengetahuan mengenai bangsa dan tanah air Indonesia. Berikut adalah catatan khusus mengenai bahasa asing ini.

Akan tetapi meskipun kita ini terikat oleh bahasa Belanda itoe, djanganlah kita loepa, bahwa dengan perteloengan bahasa asing itoe kita soedah dan masih dapat membongkar segala „goetji-wasiat“ jang berisi ilmoe dan pengetahoean, jang semata-mata mengenai bangsa dan tanah air kita sekalian.

Selain catatan khusus tentang bahasa asing, juga terdapat semacam peringatan dini dalam kaitan eratnya bahasa Indonesia dengan bahasa (daerah) Melayu. Dalam kaitan ini, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Berikut adalah pertanyaan dasarnya.

Bahasa apa dan manakah jang oleh kita diseboetkan bahasa Indonesia itoe?

Atas pertanyaan yang sangat khas dalam praktik perencanaan bahasa tersebut, M. Tabrani sangat tegas menyatakan adanya kesalahan dengan sebutan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sebutan semacam itu berimplikasi serius dalam bentuk ancaman yang bersifat imperialisme terhadap bahasa yang lain-lain pada bangsa Indonesia.

Djika kita menjeboetnja bahasa itoe bahasa Melajoe salahlah kita. Karena seboetan sematjam itoe seolah² dan mesti mengandoe sifat imperialisme dari bahasa Melajoe terhadap kepada lain² bahasa bangsa kita disini.

Pada pokok permasalahannya, makalah ini hendak mengungkap hal ihwal problematis dalam kaitan erat bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tersebut. Permasalahan krusialnya ialah terputusnya sejarah Melayu itu di seputar Selat Malaka dan belum terhubungnya jejak sejarah bahasa itu dengan Barus. Untuk itu, perlu dicari sebuah solusi alternatif atas problematika linguistik itu dengan meninjau kembali praktik perencanaan bahasa terangkai—secara lebih khusus dalam hubungannya dengan status bahasa Indonesia, daerah, dan asing—sebagaimana dimuat dalam gerakan *trigatra bangun bahasa*. Solusi alternatif itu dicari melalui pendekatan DNA sastra bangsa Indonesia, yaitu pendekatan genetis-kehidupan berbangsa dalam hal berbahasa (di) Indonesia, antara lain dengan memanfaatkan data kesusastraan Melayu (daerah) Barus atas besarnya pengaruh bahasa Arab, di samping dampak bahasa asing lainnya.

B. METODOLOGI

Pada bagian terdahulu telah disebutkan pentingnya keberadaan Barus yang merupakan episentrum pertumbuhan *lingua franca* bagi bangsa Indonesia. Ini adalah karena jejak Barus sebagai titik pusat perdagangan antar-bangsa yang diketahui sangat purba di Indonesia. Dari titik pusat perniagaan dunia kemenyan dan kapur barus/kamper ini, terdapat aspek ontologis *lingua franca* bangsa Indonesia itu untuk menyambungkan jejak genetis-kebahasaan yang masih terputus di seputar titik garis perkembangan Melayu (Selat) Malaka. Secara metodologis, seturut pandangan teori dari Kuntowijoyo (2003: xviii)³, pendekatan genetis seperti ihwal jejak DNA sastra bangsa Indonesia yang akan dibahas lanjut di sini merupakan “milik khas sejarawan”. Dari aspek epistemologis, seturut dengan teori Kuntowijoyo, pendekatan genetis ini merupakan salah satu cara menghubungkan sejarah masa lalu dengan masa kini.

Bagian ini mengungkap persoalan metodologis terkait dengan tinjauan Charlie Hanawalt (2010). Mengenai perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, Hanawalt mengatakan, “Sejarah perencanaan bahasa Melayu mengawali terbentuknya Indonesia sebagai suatu bangsa berabad sebelumnya.” Dengan mengikuti pandangan Grimes (1996), ia menunjukkan ragam bahasa Melayu sebagai bahasa asli Sumatra dan Semenanjung Malaka yang dilaporkan oleh orang Portugis telah digunakan untuk *lingua franca* pada awal tahun 1500-an di belahan timur Indonesia sekarang. Kemudian, pada tahun 1865, ragam bahasa Melayu itu dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai standar tulisan dalam perdagangan dan keagamaan di banyak bagian di Indonesia serta diakui sebagai bahasa Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pada saat yang sama. Pada saat itu, belum ada sebutan khusus untuk bahasa daerah dan/atau asing terkait ihwal dua bahasa itu.

Mengenai perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, duduk persoalan metodologisnya terdapat pada peristiwa akbar 28 Oktober 1928 ketika Kongres Pemuda Indonesia mengikrarkan teks Sumpah Pemuda untuk menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia. Dalam hal dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dengan merujuk pada pendapat Grimes (1996), Hanawalt pun bersepakat bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu langkah pembentukan identitas nasional. Dalam hal itu pula, Hanawalt berkata, “Pusat Bahasa [sekarang, Badan Bahasa atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa] dibebankan tugas yang berat dalam memimpin perencanaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan *juga bahasa-bahasa lain* yang dipakai di seluruh Indonesia.”

Dari tinjauan Charlie Hanawalt tersebut, muncul persoalan metodologis dalam hal objek kajian perencanaan bahasa terangkai itu. Fakta bahwa *bahasa-bahasa lain* dipakai di seluruh Indonesia belum dijelaskan lebih terperinci dengan fakta adanya bahasa daerah dan bahasa asing—selain bahasa Indonesia—seturut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Pasal 1). Berikut adalah ketentuan undang-undang mengenai tiga jenis bahasa tersebut.

³ Pandangan Kuntowijoyo ini ditulis pada pengantar buku *Metodologi Sejarah* yang diterbitkan oleh PT Tiara Wacana Yogya (Edisi Kedua: Agustus 2003) yang dapat diunduh melalui laman <https://fliphtml5.com/macgd/cvcp/basic>.

1. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI.
2. Yang dimaksud dengan bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah NKRI.
3. Yang dimaksud dengan bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Jelaslah bahwa menurut konstitusi Indonesia, ada bahasa lain—selain bahasa Indonesia dan daerah—yang juga digunakan di Indonesia. Bahasa lain itu adalah bahasa asing. Jauh-jauh hari, dalam dokumen *Politik Bahasa Nasional*, Amran Halim (1976: 15) telah menerangkan rangkaian tiga hal bahasa itu sebagai berikut.

Sebagai masalah nasional, keseluruhan masalah bahasa di Indonesia merupakan satu jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah bahasa asing. Di dalam jaringan ini, sebagai akibat pemakaian bahasa-bahasa ini di dalam masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Indonesia, masalah bahasa nasional, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing itu memiliki hubungan timbal balik. Pengolahan masalah bahasa nasional tidak dapat dipisahkan dari pengolahan bahasa-bahasa daerah; demikian pula sebaliknya. Pengolahan masalah bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah tidak pula dapat dilepaskan dari masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia.

Dalam hal ihwal perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, tinjauan Charlie Hanawalt (2010) memperlihatkan dua persoalan metodologis. *Pertama*, objek kajian yang disebut “bahasa asli Sumat(e)ra” belum/tidak merujuk konsep linguistiknya pada ragam Melayu daerah di kota kuno Barus sebagai kawasan episentrum pertumbuhan lingua franca bagi bangsa Indonesia. *Kedua*, bahasa (persatuan) Indonesia masih dianggap jejak sejarahnya berawal dari ragam “Semenanjung Malaka” yang keberadaan episentrumnya tidak di dalam, tetapi di luar, wilayah NKRI. Persoalan metodologis ini tampak berimplikasi sangat serius pada isu kedaulatan bahasa Indonesia yang akhir-akhir ini muncul di ruang publik.

Pada peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2024⁴, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menekankan perihal “bagaimana kita membangun kedaulatan bahasa Indonesia”. Dalam hal itu, tiga isu kedaulatan diperinci sebagai berikut: kebanggaan, kemahiran, dan kemajuan dengan bahasa Indonesia. Dalam hal bangga berbahasa Indonesia tersebut, kedaulatan bahasa Indonesia masih perlu diperkuat jejaringnya secara nasional, sebagaimana telah diterangkan oleh Amran Halim di atas, demi keberlangsungan praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Kedaulatan dimaksud tampak masih bermasalah dengan jejaring bahasa Indonesia yang masih terputus.

Namun, sekarang, jejak sejarah bahasa Indonesia yang terputus di seputar titik garis perkembangan Melayu (Selat) Malaka itu mulai dapat terhubung kembali dengan jejak genetis-kebahasaan Melayu di daerah Barus. Keterhubungan dua titik pusat peradaban Nusantara (antara kawasan Barus dan Malaka) ditunjukkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2023). Potensi kearifan lokal dari daerah Barus tersebut diungkap secara khusus oleh Amich Alhumami, Ph.D. pada 21 Mei 2023 dengan menyebutkan tokoh kesusastraan Melayu Barus—Hamzah Fansuri—pada urutan pertama sebelum Raja Ali Haji. Sejak berabad-abad lamanya, menurut pandangan Bappenas, tokoh dalam bidang sastra ini muncul tidak hanya menginspirasi masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia.⁵

⁴ Pameran kebahasaan ini secara khusus mengangkat tema “Membangun Kedaulatan Bahasa Indonesia untuk Generasi Bangsa (<https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/mendikdasmen-canangkan-gerakan-bangga-mahir-dan-maju-dengan-bahasa-indonesia>)

⁵ Amich Alhumami, Ph.D. adalah Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, & Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas) yang pada ...



□ **Hamzah Fansuri**

Pemikir dan aktivis kebudayaan *par excellence*. Melakukan pembaharuan kebudayaan Melayu. Memperkenalkan syair, puisi empat baris dengan rima akhir a. Mengangkat harkat dan martabat bahasa Melayu dari sekedar bahasa menjadi bahasa intelektual, kearifan dan ekspresi ilmiah yang canggih dan modern.



□ **Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad**

Perumus *Gurindam Duabelas*, salah satu tokoh penting di dunia Melayu). Karyanya (prosa/sastra Melayu) menjadi rujukan dunia, baik dalam tradisi penulisan klasik maupun modern.

Ketokohan sastrawan Indonesia yang bereputasi internasional tersebut telah dinyatakan pula pada kesempatan sebelumnya oleh Didik Darmanto (Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas). Pernyataan resminya disampaikan pada 22 November 2023 dalam acara diskusi “Arah Kebijakan Pembangunan Bahasan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025--2029” di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. Pada kesempatan itu, telah dibuat daftar “DNA sastra bangsa Indonesia” yang dalam diskusi dengan Amich Alhumami tersebut diberikan konfirmasi atas ketokohan sastrawan (daerah) Melayu Barus, Hamzah Fansuri, sebagai urutan pertama sebelum Raja Ali Haji.

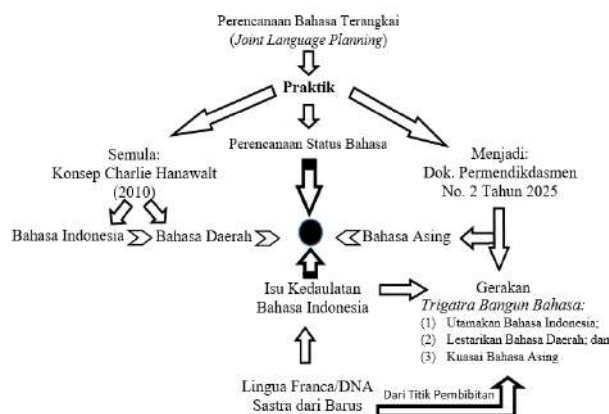
Pada bagian metodologi ini, amatlah penting untuk menjelaskan kemunculan daftar DNA sastra bangsa Indonesia sebagai sumber rujukan guna menghimpun data kualitatif dalam penulisan makalah ini. Pemuatan dua tokoh sastrawan dan pengurutan peristiwa yang sedemikian rupa oleh Bappenas (2023) itu selaras dengan pendekatan genetis dalam penulisan sejarah (bahasa) Indonesia. Dalam hal pendekatan teori sejarah, oleh Kuntowijoyo—secara khusus dalam pembahasan metodologi (*science of methods*), yaitu ilmu yang membicarakan jalan—dikatakan dengan sangat tegas, “Tidak ada gejala yang tidak mengalami pertumbuhan.” Demikian pula dalam hal perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Dengan pendekatan ilmu sejarah ini, pengungkapan pertumbuhan bahasa Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan genetis dari dua aspek sejarah: kesinambungan dan perubahan.

Adalah fakta adanya kesinambungan dalam perjalanan waktu kehidupan berbahasa Indonesia dan perubahannya dalam hal lokasi pertumbuhan bahasa Indonesia. Fakta itu ditunjukkan dengan keberadaan dua tokoh sastrawan Indonesia yang berbeda dari rentang waktu dan ruang kehidupannya. Selain aspek genetis itu, Kuntowijoyo juga menegaskan pentingnya prinsip “paralelisme” demi kesejajaran masa kini dan sejarah masa lalu. Dalam kaitan kesejajaran itu, sekarang terdapat rumusan *trigatra bangun bahasa* yang berisi tiga jenis bahasa: Indonesia, daerah, dan asing yang tumbuh kembangnya masing-masing tertelusur dari Barus. Dalam hal bahasa Melayu sebagai bahasa daerah di kawasan kota kuno itu dapat diparalelkan sekarang dengan bahasa daerah Melayu yang lain dan dengan bahasa daerah lainnya lagi di Indonesia seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda.

Ihwal bahasa daerah itu adalah sama halnya dengan keberadaan bahasa Arab pada zaman dahulu di Barus sebagai bahasa Asing yang kedudukannya tetap paralel hingga sekarang. Dengan mengingat peran pentingnya bahasa daerah dan asing dalam perjalanan sejarah bahasa Indonesia, perlu ditegaskan kembali bahwa terputusnya hubungan kesejarahan bahasa dan sastra Indonesia antara Malaka dan Barus itu sangat bermasalah. Makalah ini telah mengidentifikasi permasalahan tersebut bersifat metodologis untuk mengungkap adanya fakta kedudukan bahasa Indonesia pada saat ini sebagai simbol/identitas NKRI yang tidak semestinya tersubordinasi oleh simbol/identitas negara atau bangsa yang lain.

Dalam hal sejarah bahasa Indonesia ini, secara metodologis, Kuntowijoyo memberikan ilustrasi yang sangat relevan. Dengan mengkaji industrialisasi Eropa, diketahui pula—dengan segala perbedaannya—industrialisasi di Indonesia. Dengan analogi itu, permasalahan metodologis yang teridentifikasi dalam makalah ini adalah bahwa bahasa Indonesia tidak dapat diperbandingkan karena fakta kedekatan titik pertumbuhan *lingua franca* bangsa Indonesia di seputar kawasan Selat Malaka tersebut dengan wilayah geografis negara lain. Keterputusan jejak genetis—kehidupan bahasa Indonesia di seputar Selat Malaka itu berdampak secara potensial dalam hal hilangnya ciri kajian sejarah perbandingan untuk bahasa Indonesia. Sementara itu, menurut Kuntowijoyo, sejarah perbandingan merupakan sebuah cara, selain dengan pendekatan genetis dan paralelisme—untuk menghubungkan peristiwa pada masa lampau dengan era kekinian.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dalam penulisan makalah ini, telah dibuat kerangka metodologis untuk mengungkap kesejarahan bahasa Indonesia yang tidak terlepas dari terbentuknya bahasa daerah, pada satu sisi, dan bahasa asing, pada sisi lain.



Dalam penulisan makalah ini, secara metodologis, perencanaan bahasa terangkai (*joint language planning*) merupakan bentuk praktik perencanaan status bahasa (Indonesia, daerah, dan asing) yang kemudian—melalui penerbitan dokumen Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia—menjadi spirit gerakan *trigatra bangun bahasa*. Semula, oleh Charlie Hanawalt (2010), praktik perencanaan bahasa terangkai itu dibuat hanya dengan memasukkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tanpa bahasa asing, secara khusus sebagai objek kajian dalam konsep awalnya. Dalam hal pendaulatan bahasa Indonesia, isu sentralnya ialah bahwa bahasa-bahasa lain—apa pun namanya, selain bahasa Indonesia—belum tentu duduk dalam statusnya masing-masing sebagai bahasa daerah atau bahasa asing, seturut ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.

Muncul isu strategis dalam perencanaan bahasa terangkai itu dari fakta sejarah atas bahasa Indonesia yang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pemerintah kolonial Belanda (1865) tentang pengakuan bahasa Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Acuan ketentuan pemerintah kolonial itu adalah ragam bahasa Melayu yang merupakan bahasa asli Sumatra dan Semenanjung Malaka yang dilaporkan sebagai *lingua franca* di belahan timur Indonesia pada awal tahun 1500-an. Ketentuan kebijakan pemerintah kolonial itu tampak masih berlaku dan belum dimutakhirkan hingga sekarang. Melalui praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, perlu diusulkan pematkhiran kebijakan kebahasaan yang bertitik tolak dari episentrum pembibitan spirit gerakan *trigatra bangun bahasa* di Barus untuk menyambung mata rantai sejarah kebahasaan yang terputus di seputar titik garis perkembangan Melayu (Selat) Malaka. Dari titik pusat pembibitannya di Barus, bahasa persatuan Indonesia tampak makin kuat statusnya karena secara berkesinambungan telah terjadi pembentukan dan konsolidasi gerakan kebahasaan yang berlangsung selama lima abad terakhir ini.

C. ANALISIS

Atas dasar kerangka metodologis yang telah dijelaskan di atas, analisis terhadap pokok bahasan makalah ini dibuat menjadi empat bagian. Bagian pertama membahas peran linguistik dalam praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Bagian kedua menjelaskan gerakan konsolidasi *trigatra bangun bahasa*. Diketahui bahwa konsolidasi kebahasaan ini dimulai pada awal abad XXI, antara lain, dengan bukti empiris terbitnya dokumen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pada bagian kedua, juga dijelaskan bahwa program penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan salah satu praktik baik dalam perencanaan bahasa terangkai ini pada abad konsolidasi.

Bagian ketiga menunjukkan fakta sejarah kebahasaan bahwa konsolidasi *trigatra bangun bahasa* merupakan kesinambungan dari pergerakan sosial-kebahasaan pada abad-abad sebelumnya (XVII--XX). Selama empat abad itu, telah terjadi pembentukan tiga jenis bahasa (bahasa Indonesia, daerah, dan asing). Abad pembentukan spirit trigatra bangun bahasa ini diketahui bermula dengan terbitnya dokumen pengetahuan kebahasaan dalam bentuk kamus tertua beraksara Latin (1603) yang disusun oleh Frederick de Houtman di Aceh. Keberaksaraan itulah yang juga menandai adanya puncak

pembibitan spirit kebahasaan itu di kawasan kota kuno Barus pada abad XVI. Pada bagian akhir pembahasan makalah ini, ihwal lingua franca dan DNA sastra bangsa Indonesia dianalisis secara khusus dengan memanfaatkan data kebahasaan dari karya sastra (daerah) Melayu Barus: Hamzah Fansuri, yang juga dikenal secara luas berkarya di Aceh, dengan serapan bahasa (asing) Arab dan bahasa daerah lain, termasuk Jawa.

1. Peran Linguis dalam Praktik Perencanaan Bahasa Terangkai di Indonesia

Fakta sejarah kebahasaan menunjukkan bahwa melalui sebuah peristiwa akbar—ikrar Sumpah Pemuda 1928—spirit kehidupan berbahasa Indonesia sangat terencana. Teks ikrar atau kebulatan tekad dari para pemuda itu memperikutkan bahwa bahasa-bahasa lain (selain bahasa Indonesia) dijadikan berstatus sebagai bahasa daerah dan bahasa asing. Namun, belum besar—apabila ada—peran linguis yang tampak dalam praktik perencanaan status bahasa Indonesia, daerah, dan asing.

Fakta sejarah terbentuknya tiga bahasa tersebut memperlihatkan bahwa penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (1928) dan bahasa resmi negara (1945) tidak dilakukan oleh linguis, tetapi oleh tokoh pergerakan nasional—antara lain, M. Tabrani dan Soepomo—yang tampak masih sangat jarang disebut-sebut namanya oleh warga masyarakat linguistik Indonesia. Oleh karena kealpaan itu, tiga siklus pergerakan sosial-kebahasaan—pembibitan, pembentukan, dan konsolidasi spirit gerakan *trigatra bangun bahasa*—dilakukan revidi teoretis pada bagian ini dari aspek peran linguis dalam praktik perencanaan bahasa terangkai ini di Indonesia.

1.1 Dari Teori ke Praktik Perencanaan Bahasa Terangkai di Indonesia

Dalam hal ihwal perencanaan bahasa, secara umum, peran linguis pernah dipertanyakan oleh Chris. Kennedy (1982) sebagai berikut: “*the determination of language policy is a political activity and policy decision will be made by politicians, not linguists*”. Menurutnya, bukan linguis yang menetapkan kebijakan bahasa, melainkan para aktivis politik bahasa. Namun, begitu sekarang beredar isu kedaulatan bahasa Indonesia, tentu besar harapan akan ada peran linguis Indonesia, terutama dalam kepakaran sosiolinguistik. Untuk itu, diperlukan landasan teori sosiolinguistik—sebagaimana dipahami oleh Basuki Suhardi dkk. (1995) dalam buku *Teori dan Metode Sosiolinguistik*—yang dibentuk dengan kesepakatan, tanpa banyak perdebatan, oleh karena kedudukan penting istilah *diglosia/poliglosia*. Pada bagian ini disajikan lebih lanjut analisis linguistik yang mengungkap ihwal teori sosiolinguistik tersebut dalam lingkup perencanaan bahasa dan—secara khusus—dalam ruang praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia serta secara lebih khusus lagi praktik mengenai status bahasa Indonesia, daerah, dan asing.

Secara teknis-linguistik, di bidang studi teori sosiolinguistik, terdapat beragam istilah untuk mendiskusikan secara akademis permasalahan praktik perencanaan bahasa. Springer (1956) terlebih dahulu menyebut nama *language engineering* untuk istilah *language planning* yang pertama kali digunakan oleh Haugen (1959) dalam makalah “Planning for a Standard Language in Modern Norway”. Peristilahan terkait dengan praktik perencanaan bahasa pun bermunculan, sebagaimana disebutkan oleh Khairil Ansari (2010) dalam simposium perencanaan bahasa.⁶ Dalam kaitan itu, ada istilah *language development* dari Noos (1960) dan *language cultivation* (Galvin, 1964) yang keduanya tampak diadopsi untuk nomenklatur lembaga perencana bahasa di Indonesia, yakni Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sekarang). Peran penting lembaga kebahasaan tersebut dibahas lebih lanjut pada bagian ini.

Data/fakta terkait pengalaman praktik bekerja bersama dengan C. Ruddyanto sekitar lima belas tahun (sejak 1993) di Badan Bahasa (sebelumnya: Pusat Bahasa) disajikan di sini. Pengalaman empiris ini berkaitan erat dengan kerja perencanaan bahasa, terutama dalam perintisaan dan pelaksanaan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bersama juga dengan Dr. Sugiyono. Pada

⁶ Simposium ini diadakan oleh Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional dengan tema “Perencanaan Bahasa pada Abad ke-21: Kendala dan Tantangan”. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2–4 November 2010 di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta. Melalui simposium ini diharapkan kita dapat bertukar pikiran dengan para pakar perencanaan bahasa dari berbagai negara, untuk mengetahui perkembangan perencanaan bahasa di berbagai negara (<https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/kegiatan-detail/1294/simposium-internasional-perencanaan-bahasa-2010>).

kesempatan ini tidak dibahas ihwal UKBI itu sebagai salah satu instrumen penting dalam perencanaan bahasa di Indonesia pada hari ini. Namun, sebagai catatan penting, Ruddyanto (2010) menyebutkan bahwa kata *pembinaan* (*cultivation*) dan *pengembangan* (*development*) yang melekat pada lembaga kebahasaan yang sebelumnya bernama *Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa* itu merupakan “manifestasi” perencanaan bahasa di Indonesia”.

Secara terperinci, manifestasi dari teori linguistik ke dalam praktik perencanaan bahasa telah dibahas oleh Moeliono (1986). Sejak diajukan oleh Moeliono (Kepala *Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa* dari tahun 1984 hingga 1988), dua anjakan teoretis itu pada praktiknya masih sangat relevan hingga kini untuk memecahkan beragam permasalahan kebahasaan. Di samping teori pembinaan dan pengembangan bahasa, Moeliono juga menambahkan istilah *kebijakan bahasa* sebagai anjakan alternatif. Istilah *kebijakan bahasa* ini dimanfaatkan pertama kali pada tahun 1975 oleh Halim (1976) dalam dokumen perencanaan bahasa dengan bertajuk *Politik Bahasa Nasional*. Dokumen Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut kemudian dilakukan pembaruan melalui seminar *Politik Bahasa* pada 1999.

Baik dokumen hasil seminar *Politik Bahasa Nasional* (1975) maupun hasil seminar *Politik Bahasa* (1999) tersebut berisi hal yang sama, yaitu pengaturan *alokasi fungsi bahasa yang digunakan di Indonesia, yang digolongkan ke dalam tiga kategori: bahasa nasional/negara, bahasa daerah negara, dan bahasa asing* (Ruddyanto, 2010). Dalam hal perencanaan bahasa ini, substansi pengaturan alokasi fungsi tiga jenis bahasa (Indonesia, daerah, dan asing) tersebut telah mendasari gerakan pembangunan kebahasaan yang hingga sekarang dikenal sebagai *Trigatra Bangun Bahasa: utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; (dan) kuasai bahasa asing*. Praktik perencanaan bahasa terangkai itu telah lama dimanifestasikan di Indonesia dari beragam teori sociolinguistik melalui peran penting para linguist Indonesia, antara lain dengan sikap bahasa yang dirumuskan—terutama oleh para linguist senior—dalam dokumen politik bahasa.

Sikap politik bahasa yang diungkapkan oleh para linguist Indonesia itu dirumuskan dalam putusan kongres bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Salah satu sikap mereka ialah keinginan kuat untuk membuat undang-undang kebahasaan. Namun, sikap ini tidak bulat karena ada sebagian dari kalangan masyarakat linguistik Indonesia yang kurang sepakat atau tidak sependapat dengan rencana pengaturan alokasi fungsi bahasa itu dalam wujud dokumen peraturan perundang-undangan. Sikap ketidaksetujuan itu diungkap, antara lain, oleh Eko Endarmoko (2007) dengan publikasi tulisan “Xenofobia” di ruang *Bahasa!* dalam majalah *Tempo*, 14 Januari 2007. Sikap Eko Endarmoko yang cenderung menolak pengaturan bahasa demi kebebasan berbahasa asing itu memperoleh tanggapan sebagai berikut.

BAHASA INDONESIA-RUU

Maryanto

UU Bahasa: Xenofobia atau Xenofilia?

(Tanggapan atas tulisan Eko Endarmoko "Xenofobia")

HARUSKAH bahasa asing dibenci? Benarlah Undang-Undang Bahasa digagas atas dasar rasa takut yang akut pada bahasa asing! Adalah Eko Endarmoko yang beropini, sangat jauh di ruang Bahasa majalah ini (Tempo, 14 Januari 2007). Menurut dia, undang-undang itu digagas oleh "para pembela bahasa Indonesia yang telah kehabisan akal".

Kalau dibenci, mengapa sekitar 340 ribu unsur bahasa asing sudah tersebar ke dalam bahasa Indonesia? Sudah lama tata bahasa Indonesia dikembangkan, tentu dengan memanfaatkan tata bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang telah memiliki TOEFL, TOEIC, dan IELTS itu juga dimanfaatkan untuk pengembangan alat ukur Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Kekayaan bahasa Indonesia itu (dan masih banyak lainnya) berkembang tanpa kebencian terhadap bahasa asing.

Buruk muka lantas cermin dibelah? Tidakkah begitu. Malahan, buruk muka lalu cermin lain dicari. Cermin orang lain dianggap mampu mengubah muka. Malah, akal kurang sehat ketika cermin orang lain itu membuat kagum akan muka yang sebenarnya menipu diri.

Contoh BSD City dapat diambil sebagai sebuah bentuk penipuan diri. Siapa yang tidak tahu padanan kata city dalam bahasa Indonesia? Asalkan mereka sedikit melik bahasa Indonesia (katakalah cuma kualifikasi "Terbatas" dalam ukuran UKBI), kata itu tentu sudah diketahui. Persoalan mereka bukan tahu atau tidak tahu. Mereka tidak mau tahu. Itu persoalan sikap yang agaknya luput dari sarotan Eko Endarmoko.

Sikap tidak mau tahu bahasa Indonesia tampak berpangkal pada rasa kagum (gandrung) akan bahasa asing. Ujung-ujungnya tidak boleh jadi ialah. Betapa banyak orang Indonesia yang

latah kalau dipakai menuturkan tulisan nama asing seperti Golden Road, Ocean Park, dan BSD Junction.

Kekaguman yang dipertontonkan di BSD City tersebut menyiratkan tanda tanya besar. Mengapa dulu kita merasa enak dengan bahasa Indonesia? Namun, dengan pengembang terakhir di kawasan BSD City, tidak terasa nyaman kalau mereka tidak berbahasa asing?

Pertanyaan itu perlu dilontarkan kepada tiga pihak yang saling terkait. Pertama, pihak warga penghuni kota, pengembangan ketiga, lembaga pengatur pengembangan kawasan. Khusus bagi warga penghuni, pilihan bahasa (Inggris atau Indonesia) itu mungkin soal selera selera-pilih bahasa apa saja. Seperti kata Eko Endarmoko, bahasa memang "berwatak manusuka".

Awaiyah. Meski berwatak manusuka, sebuah bahasa tidak selalu dipakai menurut selera pemakainya. Dalam bahasa itu pemakai tidak mungkin berbahasa sesuka hati. Kelasnya, ada semacam kaidah yang tak-pernah tertulis: janganlah berbahasa sembarangan. Itu konvensi dalam bahasa apa pun.

Perwatakan bahasa (termasuk pemakainya) tersebut mungkin lebih tepat disebut "kebebasan dalam keterikatan". Masalahnya akan muncul ketika keterikatan bahasa itu mengacu pada sebuah aturan kebebasan yang berupa undang-undang. Perlukah kebebasan setiap warga masyarakat diatur dengan sebuah undang-undang? Kesangsian itu pun sangat wajar.

Contoh BSD City telah memperlihatkan watak bahasa yang bebas (bagi pengembangan) hanya terikat dengan pihak warga masyarakat (konsumen). Pihak lembaga pengatur usaha pengembangan kawasan itu (entah namanya Pemerintah Daerah, Departemen Perumahan Rakyat, atau Kementerian Perumahan) tidak mengikat kebebasan pengusaha.

Dari contoh tersebut, agaknya, anta-

ra para pengusaha dan lembaga pengatur usaha itu tidak (belum) ada kaitan kelembagaan yang kuat (payung hukum) dalam hal bahasa. Untuk menanggung untung usahanya, dengan sesuka hati, para pengembang dapat mengumbar sejera bahasa masyarakat konsumennya. Memang, pada era global ini, sebagian besar masyarakat sedang menggandrungi bahasa asing.

Di tengah kealpaan peraturan kebahasaan tersebut, lembaga pengatur usaha itu justru turut larut dalam kekaguman terhadap bahasa asing. Kekaguman yang menjalar ke lembaga seperti itu sudah tidak wajar dan perlu diwaspadai. Sudah saatnya, saya kira, kekaguman itu diberi semacam terapi kejut (*shock therapy*). Untuk itu, lahir Undang-Undang Bahasa teresusun.

Undang-Undang Bahasa perlu disusun untuk menjaga agar semangat Sumpah Pemuda 1928 dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bahasa Indonesia tidak kendur. Semangat dan amanat tersebut masih perlu dijabarkan. Apa saja tugas dan fungsi lembaga negara, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk melestarikan bahasa Indonesia (sebagai bahasa negara dan bahasa nasional)? Masalah kelembagaan bahasa itu lah yang sangat mendesak untuk diatur secara jelas dan tegas dengan produk legislasi.

Undang-Undang Bahasa (apa pun bentuk gagasannya sementara ini), menurut hemat saya, perlu disambut baik sebagai wujud kewaspadaan nasional di tengah arus kekaguman global. UU Bahasa tidak digagas atas dasar perasaan benci atau takut akan bahasa asing (bahasa global). Kekaguman terhadap bahasa asing yang mulai tak-terkendali itulah yang perlu diwaspadai.

* Karyawan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan mahasiswa Program Pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta

Tempo, 04 Maret 2007
No. 01/ XXXVI

Dokumen *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan* (Nomor 003/Maret 2007) yang disusun oleh Perpustakaan Pusat Bahasa menyimpan data yang menarik dalam kaitan dengan persoalan praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Selain terdokumentasikan tanggapan atas sikap Eko Endarmoko itu, juga tersimpan pandangan kebahasaan dari Ariel Heryanto dalam harian Kompas, 11 Maret 2007 ("Asal-Usul RUU Bahasa") dan Bambang Bujono dalam majalah *Tempo*, 25 Maret 2007 ("Daripada UU Kebahasaan"). Penolakan tidak hanya tercermin dari pendapat perseorangan, tetapi juga lembaga media massa.

BAHASA INDONESIA-RUU

Merawat Bahasa tanpa Undang-Undang

Perlu perdebatan keras dan ketat tentang Rancangan Undang-Undang Kebahasaan.

Apakah kita membutuhkannya?

SEBUAH Rancangan Undang-Undang Kebahasaan tengah digodok. Sebagian masyarakat terkejut. Sebagian lagi bertanya, apakah ada musuh bahasa yang tengah membidik ketenteraman kehidupan.

Bahasa menunjukkan peradaban. Dalam kata "peradaban" sudah terakup makna yang begitu luas, yang menunjukkan bahwa dengan sendirinya bahasa sudah memiliki peraturan, hukum, dan kaidahnya sendiri. Bahasa Indonesia lahir dan dikukuhkan oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai bahasa yang "satu"; sebagai petunjuk bahwa kita bangsa yang merdeka. Seudah kita merdeka, bahasa Indonesia terus-menerus mengatur dirinya—bersama para pengunanya, warga Indonesia—dan ditetapkan sebagai bahasa yang resmi untuk bahasa pengantar dalam pemerintahan, pendidikan, dan alat komunikasi sehari-hari, tertulis maupun lisan.

Kita menjadi satu dari sedikit bangsa yang pernah dijajah tapi tak menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi. Negara di Afrika masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris dan Prancis sebagai bahasa pengantar dalam pemerintahan, pendidikan, dan media; negara Amerika Latin bahkan menggunakan bahasa Spanyol (kecuali Brasil yang menggunakan bahasa Portugis) sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Indonesia menjadi bangsa yang memiliki bahasa yang begitu mandiri, menjadi alat komunikasi yang lancar di dalam negerinya sendiri tanpa ditekan oleh "superioritas" bahasa lain.

Dalam hal ini, Indonesia sudah seharusnya merasa cukup nyaman dengan posisi ini. Tentu saja, sebagai bangsa yang "baru lahir", kita masih perlu bergulat, ikut memperkaya dan membuat serangkaian kesepakatan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang masih berkembang ini. Tetapi upaya pergulatan ini tak serta-merta berarti dibutuhkan sebuah pagar bernama undang-undang yang mengatur kehidupan berbahasa seperti seperangkat tentara yang tengah menghadapi musuh.

Draf rancangan undang-undang yang tengah beredar di masyarakat kini tak berhasil meyakinkan kita bahwa undang-undang ini perlu lahir. Bahkan ada pasal-pasal yang membuat kita seperti terlontar ke periode Orde Baru, takhala segala sesuatu—bahkan yang berbau kreativitas—membutuhkan izin berbagai departemen yang pada gilirannya dengan mudah melahirkan birokrasi ruwet dan korupsi.

Tengoklah pasal 16 RUU Kebahasaan yang, antara lain, mengatur "media massa, baik cetak maupun elektronik... wajib menggunakan bahasa Indonesia," dan ditambahkan pula bahwa media massa yang ingin menggunakan bahasa asing harus mendapat izin menteri. Implikasinya, jika ada media yang ingin menggunakan bahasa Inggris, misalnya, atau bahasa Cina atau Jawa, harus mendapat izin menteri.

Contoh butir lain menyebut bahwa film, sinema elektronik, dan produk multimedia lain yang menggunakan bahasa asing harus dialihbahasakan ke bahasa Indonesia dalam bentuk sulih suara atau terjemahan. Jika melanggar? Ada bab yang mengatur lembaga pemerintah yang ditunjuk mengawasi penggunaan bahasa, serta adanya sanksi administratif terhadap mereka yang melanggar.

Draf RUU ini menunjukkan bahwa seolah-olah bangsa ini lengah dijajah bangsa asing, sehingga diperlukan undang-undang untuk sebuah pertahanan agar bahasa Indonesia tak mati. Harus diingat, posisi bahasa Indonesia sudah sangat nyaman dan kuat berakar di negeri ini dibanding bahasa nasional di negeri lain yang pernah mengalami penjajahan.

Majalah ini, yang sangat memperhatikan kehidupan bahasa Indonesia, lebih percaya bahwa masyarakat ini akan jauh lebih efektif dalam memelihara dan memperkaya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mandiri, efektif, komunikatif, sekaligus menjadi identitas. Kita memang membutuhkan peraturan atau kaidah dalam penggunaan bahasa yang disepakati oleh kaum pendidik, lembaga bahasa, kalangan media, dan masyarakat. Tetapi kita tak perlu undang-undang untuk memelihara bahasa yang kita cintai ini. ■

Tempo, 04 Maret 2007

No. 01/ XXXVI

Dialog di ruang publik itu memperlihatkan perjuangan yang tidak mudah untuk mewujudkan sikap politik bahasa dari kalangan linguist ke dalam putusan undang-undang. Sikap politik bahasa itu memang pada akhirnya terwujud. Sikap linguist Indonesia tampak lebih kuat meskipun tidak terbentuk undang-undang tersendiri, tetapi tergabung dengan pengaturan lain, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat ini menguatkan penetapan alokasi fungsi bahasa dalam rumusan politik bahasa sebelumnya. Selain amanat pengembangan dan pembinaan bahasa, juga ada tiga hal baru dalam manifestasi perencanaan bahasa terangkai di Indonesia: (1) perlindungan bahasa, (2) penginternasionalan bahasa Indonesia, dan (3) koordinasi kelembagaan.

Amanat perlindungan bahasa itu dapat disebut sebagai kebaruan dari manifestasi konsep teoretis yang disebut oleh **Joshua A. Fishman** sebagai *diglosia yang stabil*. Stabilitas kedudukan dan fungsi bahasa (Indonesia, daerah, dan asing) adalah amanat yang diharapkan dapat dipraktikkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam kaitan itu, secara teoretis, Fishman (1972) menyatakan bahwa perencanaan bahasa merupakan usaha yang disusun untuk mengatasi permasalahan bahasa, secara khusus pengambilan keputusan pada tataran suatu negara. Pada tataran negara Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan sebagai keputusan politik untuk menjaga keseimbangan berbahasa Indonesia, daerah, dan asing.

Fakta penerbitan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut agaknya dapat menjadi jawaban atas sinyalemen Chris. Kennedy (1982) yang telah disebutkan di atas bahwa bukan linguist yang menetapkan kebijakan bahasa, melainkan para aktivis politik bahasa. Namun, dalam amanat perlindungan bahasa tersebut—menurut Ruddyanto (2010)—keseimbangan berbahasa Indonesia dan daerah dijadikan sebagai keputusan politik bahasa yang tampak jelas mengacu pada keprihatinan atas kepunahan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu masyarakat minoritas. Isu kepunahan bahasa ibu

telah digemakan sejak tahun 1999 oleh UNESCO: lembaga dunia yang membidangi masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Organisasi badan PBB tersebut telah menganjurkan promosi bahasa ibu dengan bertolak dari peristiwa eliminasi bahasa di Bangladesh dalam perencanaan bahasa negara Pakistan. Pada saat yang sama dengan peringatan atas tragedi bahasa Bengali tersebut, UNESCO berasumsi bahwa keberhasilan pengajaran di sekolah ditentukan juga oleh penggunaan bahasa yang paling dipahami oleh murid. Dalam hal ini, tidak digunakannya bahasa ibu sebagai bahasa pengantar akan menghambat pemahaman murid/siswa sekolah. Karena adanya sambutan positif dari para linguis dan pemerhati bahasa, rekomendasi UNESCO itu bergaung cukup jauh hingga pada sikap politik bahasa di Indonesia. Bahkan, kekhawatiran para pakar juga muncul untuk mengungkap penggunaan bahasa dominan yang mematikan bahasa minoritas. Kekhawatiran itu sangat jelas merujuk juga pada situasi berbahasa Indonesia dan daerah di Indonesia.

Ruddyanto (2010) juga membahas pandangan Colins (2006) yang mengutip tuduhan bahwa penyebab punahnya beberapa bahasa daerah di Indonesia adalah adanya promosi besar-besaran bahasa Indonesia. Oleh karena itulah kehadiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2010 dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara promosi bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa daerah. Kehadiran undang-undang itu telah menandai terjadinya praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia dan dunia pada umumnya (, 2006) untuk menuju tata kelola keberagaman bahasa. Dari perspektif teori pemerolehan bahasa sebagaimana terungkap dalam buku *Language Planning and Education* (Ferguson, 2006), perencanaan bahasa di Indonesia telah dipraktikkan dalam dunia pendidikan sekolah.

Dalam hal tata kelola keberagaman bahasa tersebut, sebuah catatan kritis juga pernah dibuat seturut dengan pengakuan Rhenald Kasali (2017 dalam Maryanto, 2022). Dalam catatan ini, dikatakan bahwa di dunia pendidikan Indonesia diketahui masih ada kecenderungan menghukum; kurang memacu anak agar maju. Sebaliknya, di Amerika Serikat—seturut pengalaman empiris Rhenald Kasali—anak yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris dipuji-puji oleh guru meskipun si anak berhasil membuat karya tulis yang masih buruk. Di Indonesia, guru teridentifikasi masih dikenal sulit memberi nilai. Bahkan, bahasa Indonesia pun diketahui kerap terasa sulit bagi anak karena miskinnya asuhan berbahasa ibu.

Data tulisan “Bahasa Ibu Perlu Asuhan Guru” (Maryanto, 2022) memberikan ilustrasi persoalan praktik itu sebagai berikut. Bagaimana sikap guru apabila karangan anak ini diajukan di kelas pelajaran bahasa Indonesia? Akankah anak dari daerah Aceh tersebut memperoleh pujian dari guru dengan nilai bagus, hebat, dan mantap?

Di gampong ulon kana listrek. Ulon dengon rakan-rakan ka jeut belajar bak malam uro untuk peugot tugah-tugah sikula. Wate kamoe teungoh belajar rame-rame, ka lheun listrek. Kamoe pih gabuk/panik karena seuput dan han jeut le meurunoe. Kamoe keuneuleuh buet thoet lilen keu geulanto listrek. (diceritakan dalam bahasa Aceh oleh Iskandar (2013 dalam komunikasi pribadi).⁷

Dengan melihat terbatasnya kemampuan anak dalam berbahasa Indonesia secara resmi, guru tampak merasa cemas dan buru-buru mengoreksi bahasa si anak. Sementara ada kecemasan seperti itu, di dunia pendidikan Indonesia, masih ada pula anggapan bahasa daerah dan bahasa nasional/negara merupakan pasangan bahasa yang terpisah; belum bersifat kontinum seperti hierarki piramidal dalam teori Bloom (1956). Kesenambungan kemampuan berbahasa pada anak kurang terjamin karena prestasi anak sedini mungkin dituntut menurut ukuran bahasa baku yang dianggap lebih baik dan benar sebagai berikut.

Di desa saya sudah ada listrik. Saya dan teman sudah dapat belajar pada malam hari untuk mengerjakan tugas sekolah. Ketika sedang belajar bersama, listrik padam. Kami panik karena gelap dan tidak dapat belajar lagi. Kami menyalakan lilin sebagai pengganti listrik. (diadaptasi dari Mahsun (2014) dalam buku *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013*)

⁷ Data kebahasaan dalam teks naratif beserta penjelasan ini dapat diunduh dari laman Badan Bahasa <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/844/bahasa-ibu-perlu-asuhan-guru>.

Karena melihat situasi pembelajaran seperti itu di Indonesia, A. Chaedar Alwasilah (2012) pernah mengkhawatirkan hilangnya peran bahasa daerah dalam pencerdasan daya nalar anak bangsa. Padahal, betapa cerdasnya anak Aceh tadi. Melalui pemanfaatan bahasa ibu, teks naratif yang diproduksi anak itu sudah memenuhi tujuan pembelajaran: mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ia mencari lilin sebagai pengganti listrik yang padam.

Dalam konteks itu bahasa merupakan praktik mencari dan menemukan ilmu pengetahuan yang wacananya—menurut Norman Fairclough (1994)—diproses melalui produksi dan konsumsi teks. Dalam kaitan itu, Kurikulum 2013 telah memuat proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbasis teks yang dirancang untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Integrasi IPA dan IPS dalam pembelajaran bahasa negara itu juga membawa pesan M. Tabrani (1938): *bahasa Indonesia bukan lawan bahasa daerah*.

Dari peristiwa Kongres Bahasa Indonesia Pertama (1938) tersebut, terungkap fakta kesejarahan bahasa Indonesia. Dalam prasaran Tabrani tersebut, bahasa Indonesia dinyatakan tidak merombak bahasa daerah. Menurut Tabrani, bahasa yang digagas pergerakan kelahirannya pada tanggal 2 Mei 1926 ini disebarkan untuk mewujudkan satu tekad bertanah air, berbangsa, dan berbahasa: Indonesia. Untuk itulah, alih-alih bahasa daerah yang dibongkar atau dirombak, transisi penggunaan bahasa daerah yang menuju penggunaan bahasa Indonesia secara resmi itu perlu dirancang melalui jalur pendidikan.

Rancangan transisi berbahasa itu pernah dibuat dalam bentuk praktik yang diagendakan dalam Kurikulum 2013 dengan memberi ruang pemanfaatan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam pembelajaran tematik. Misalnya, tema sumber energi cahaya sebagaimana dicontohkan di atas dibahas dengan bahasa teks naratif. Unsur-unsur leksikogramatikal dalam teks karya siswa yang terpengaruh oleh penggunaan bahasa ibu harus dihargai. Penghargaan atas keberadaan bahasa daerah seperti itu tentu dapat mengurangi perasaan cemas akan terancamnya perkembangan bahasa daerah sebagaimana diungkapkan oleh harian *Media Indonesia* (5 Maret 2007) dalam perdebatan rancangan Undang-Undang Bahasa ketika itu.

BAHASA INDONESIA—RUU
RUU BAHASA

Perkembangan Bahasa Daerah, Seni Terancam

JAKARTA (Media): RUU Bahasa yang disusun oleh Pusat Bahasa, dampaknya dikhawatirkan akan melemahkan daya kreatif pertumbuhan bahasa dan menghambat upaya-upaya pelestarian bahasa daerah maupun kesenian.

RUU yang konon berangkat dari upaya mengatasi penggunaan bahasa Indonesia yang salah pada tayangan iklan di media televisi itu, juga dinilai sebagian kalangan sebagai bukti dari sikap defensif yang berlebihan untuk melindungi bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa Inggris.

Sastrawan Hudan Hidayat melihat RUU Bahasa merupakan upaya yang artifisial dalam bingkai kompetisi peradaban antarbangsa dan tidak esensial bagi pertumbuhan kebudayaan.

"Bahasa adalah alat ucap kehidupan yang perlu diberi fasilitas maksimal agar bahasa dalam sebuah komunitas bisa tetap lestari," kata Hudan kepada *Media Indonesia*, kemarin.

"Adanya kekhawatiran di beberapa kalangan menyikapi RUU Bahasa tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra Pusat Bahasa Abdul Gaffar Ruskhan, kemarin.

Sebagai salah satu tim perumus, Gaffar mengatakan UU Bahasa tetap ditargetkan untuk disahkan pada pertengahan 2008 mendatang. "UU itu nantinya hanya akan melarang pemakaian bahasa asing di ruang publik, namun tidak mengatur penggunaan bahasa dalam tataran seni dan sastra."

Sikap kalangan seniman yang menganggap UU itu nantinya akan membelenggu kebebasan berekspresi, menurutnya, juga tidak beres. "UU itu sama sekali tidak akan mengintervensi kesenian, terutama sastra," tegasnya.

Ia berpandangan bahwa kesenian itu sama sekali tidak bisa diatur. UU ini hanya akan mengatur ruang publik, itu pun tidak bukan larangan total, melainkan harus mencantumkan penerjemahan dalam bahasa Indonesia. (CS/Zat/H-2)

Media Indonesia, 05 Maret 2007

Sebagaimana dikutip dalam berita *Media Indonesia* tersebut, benar apa yang dikatakan oleh Hudan Hidayat bahwa *bahasa adalah alat ucap kehidupan yang perlu diberi fasilitas maksimal agar bahasa dalam sebuah komunitas bisa tetap lestari*. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003), sambil mengasuh bahasa ibu si anak, guru seharusnya mampu memfasilitasi rangsangan agar setiap siswa berpikir kritis seperti pada contoh praktik pembelajaran teks di atas. Pada tahap awal pendidikan dasar itu, guru tidak perlu sibuk membuat koreksi—apalagi tega memberi hukuman dengan nilai buruk—atas diskusi dalam bahasa ibu: bentuk kata *listrek*, *sikula*, dan semacamnya. Koreksi bahasa anak agar beragam bahasa resmi negara perlu ditunda hingga siswa memasuki kelas lanjutan di sekolah dasar.

Dalam buku *Pokoknya Rekayasa Literasi* (2012), Alwasilah pernah mengajukan konsep etnopedagogi untuk merancang pendidikan berbasis kearifan lokal dengan memasukkan bahasa daerah yang ada dalam setiap suku bangsa. Rancangan etnopedagogi itu memang perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh pada awal pendidikan formal di sekolah dasar dan dilanjutkan di ruang informal seperti dalam pendidikan keluarga dengan ayah-bunda. Lebih lanjut, dalam esai “Bahasa Ibu Perlu Asuhan Guru” (Maryanto, 2022), disebutkan bahwa perlu advokasi yang terarah kepada generasi penutur muda supaya bahasa daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang mendukung kemajuan bahasa negara yang harus tampak di ruang publik. Namun, berbagai tuntutan seperti yang disuarakan Rahmat Taufiq Hidayat (2016) agar bahasa daerah setara dengan bahasa (negara) Indonesia, perlu diikuti dengan ketaatan pada tata lokasi fungsi bahasa.

Dari perspektif teori, telah populer pula tata ruang berbahasa atau apa yang disebut dengan perencanaan lanskap bahasa (*linguistic landscape* dalam E. Shohamy, 2010). Di Indonesia, rancangan induk lanskap bahasa Indonesia sesungguhnya telah tersedia sejak UU No. 24 Tahun 2009 terbit untuk mengatur penggunaan bahasa, termasuk bahasa asing, di ruang publik. Penggunaan bahasa asing diatur ketat seperti pada merek dagang yang tidak berlisensi internasional. Pengaturan bahasa asing ini pernah menjadi perbincangan publik sebelum terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut adalah contoh percakapan yang mempersoalkan pengaturan bahasa asing di ruang publik sebagaimana diberitakan dalam harian Media Indonesia (7 Maret 2007)

BAHASA INDONESIA—RUU
RUU BAHASA

Merek Dagang, Iklan akan Diatur Ketat

JAKARTA (Media): Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa yang masih digodok pemerintah melarang pencantuman bahasa asing terhadap merek dagang berkepemilikan lokal. Sedangkan media iklan berbahasa asing diwajibkan mencantumkan terjemahan tepat di bawahnya.

Abdul Gaffar Ruskhani, anggota tim perumus draf RUU Bahasa, mengungkapkan hal itu saat menanggapi keresahan kalangan usaha terhadap RUU Bahasa terkait kabar adanya pasal yang menyebutkan semua merek dagang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tanpa kecuali. RUU Bahasa kini masih digodok pemerintah dan juga sempat diprotes kalangan seniman yang dimulainya bisa memberangsang kreativitas.

“Jika memang merek dagang itu bisa dibuktikan berafiliasi internasional, penggunaan bahasa asing tetap dibolehkan. Kecuali jika tak punya afiliasi dengan pihak asing, tapi sengaja dibuat dalam bahasa asing dengan alasan tertentu,” jelasnya.

Gaffar mencontohkan, pusat-pusat perbelanjaan milik lokal yang kini kerap menggunakan istilah ‘the’ atau ‘centre’ di depan atau di belakang merek dagangnya harus menggantinya dengan istilah bahasa Indonesia. Kecuali berlisensi atau merupakan waralaba internasional.

Sejauh ini, hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas sehingga para pengusaha menggunakan istilah asing dengan bebas. Terutama bahasa Inggris, tidak hanya dalam merek dagangnya, tapi juga dalam media promosi termasuk juga iklan luar ruang. “Alasan mereka penggunaan bahasa Inggris dinilai lebih bergengsi,” ujar Kepala Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra Pusat Bahasa ini.

Sementara itu, dalam media iklan, lanjutnya, bahasa asing tetap diperbolehkan asal disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia tepat di bawah istilah asing tersebut. Ketentuan itu menurutnya beralasan demi menjaga kewibawaan bahasa Indonesia.

Media Indonesia, 07 Maret 2007

Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut hendak memastikan bahwa bahasa asing dan bahasa daerah/bahasa ibu tidak berebut fungsi dengan bahasa negara di ruang publik. Dalam hal penulisan (1) nama gedung/lembaga, (2) nama sarana umum, (3) nama ruang pertemuan, (4) nama jabatan, (5) produk barang/jasa, (6) penunjuk arah/rambu umum, dan (7) spanduk atau alat informasi lain, bahasa Indonesia wajib diutamakan dan bahasa lainnya—apabila perlu—diikutsertakan. Kepentingan atas lanskap bahasa yang terjaga demikian ialah agar ruang publik tetap utuh berwajah Indonesia. Keutamaan bahasa Indonesia tentu tidak dapat tergantikan dengan yang lain. Ini karena kesepakatan bernegara sebagai satu bangsa, bukan negara multi-bangsa (*multinational state* dalam istilah sosiolinguistik Kloss, 1968): bangsa Jawa, Sunda, Aceh, dan lain-lain yang tidak beridentitas terpisah-pisah dengan bahasa ibu masing-masing.

Dalam kehidupan bernegara, di tengah kesibukan mengatur kemudahan bahasa asing karena kebutuhan akan investasi asing, Indonesia patut berkhidmat pada setiap perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional yang berlangsung tanggal 21 Februari. Memang, tidak perlu terulang tragedi bahasa Bengali. Bangladesh lahir terpisah dari Pakistan karena tuntutan penutur Bengali pada tahun 1952 agar bahasa daerahnya diasuh dalam dunia pendidikan dan layanan publik pemerintahannya. Untuk itu, spirit

trigatra bangun bahasa—utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; (dan) kuasai bahasa asing—sangat perlu ditanamkan pada setiap anak bangsa Indonesia.

Untuk menanamkan nilai kehidupan bernegara itu, usaha guru sangat diperlukan guna membangun kesadaran berbangsa, antara lain yang tidak kalah pentingnya dengan bahasa daerah melalui pembelajaran ilmu pengetahuan berbasis bahasa ibu di sekolah dasar. Dari pendidikan sekolah dasar hingga menengah, pada saat ini di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu'ti), perencanaan bahasa pendidikan sekolah sedang dipraktikkan melalui gerakan *Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia* untuk menjaga kedaulatan bahasa negara. Untuk itu pula, diperlukan peran penting Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

1.2 Peran Penting Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pada satu sisi, ada kepentingan koordinasi kelembagaan. Pada sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga membawa beban tugas yang lebih berat pada lembaga kebahasaan yang telah dilakukan peningkatan eselonnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010. Dari semula eselon 1 Pusat Bahasa, menjadilah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: lembaga kebahasaan yang diamanatkan dalam Pasal 45 untuk dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri, yaitu menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan (ketentuan Pasal 1). Menurut Ruddyanto (2010), peningkatan eselon itu "tidak otomatis membuat lembaga kebahasaan menjadi lebih digdaya" dalam hal berkoordinasi memmanifestasikan perencanaan bahasa di Indonesia.

Dinamika kelembagaan bahasa tersebut terlihat baru-baru ini di dalam percakapan publik dengan adanya usulan Fadli Zon untuk menarik Badan Bahasa ke Kementerian Kebudayaan (dari Kementerian Pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009). Percakapan publik itu terbaca, antara lain dalam artikel yang telah tayang di laman *Kompas.com* dengan judul "Fadli Zon Usul Badan Bahasa Ditarik ke Kementerian Kebudayaan"⁸. "Bahasa sendiri kan adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan," kata Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, sambil menyampaikan pemahaman bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditempatkan di Kemendikdasmen karena berkaitan dengan kurikulum pembelajaran siswa.

Dalam kaitan dengan kelembagaan bahasa itu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kurikulum 2013 telah memberikan konfirmasi peran penting Badan Bahasa dalam hal perencanaan bahasa terangkai ini di dunia pendidikan. Melalui jalur pendidikan sekolah, perencanaan bahasa daerah dan bahasa negara dapat diserangkaikan. Rancangan pendidikan ini sejalan dengan gagasan Charlie Hanawalt (2010) yang mengembangkan fungsi bahasa pendidikan pada taraf dasar.⁹ Melalui kebijakan pendidikan Kurikulum 2013, perencanaan terangkai antara bahasa lokal dan bahasa nasional ini dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar (SD) pada kelas awal (I—III).

Dengan kebijakan pendidikan Indonesia (baca Permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang Kurikulum SD), setiap bahasa lokal diberi kesempatan hadir mendukung pencapaian kompetensi berbahasa Indonesia. Untuk anak kelas II SD, misalnya, telah dicanangkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks naratif. Pembelajaran bahasa sebagai teks ini terintegrasi dalam kemasan tematik terpadu, seperti tema *hidup rukun*. Tema pelajaran dibagun guru bersama anak tanpa memaksakan penggunaan register bahasa (baku) nasional. Dalam implementasi kurikulum itu, anak Ambon boleh menyusun teks naratif itu seperti contoh A ini.

⁸ Artikel ini dapat dibaca lebih lanjut melalui laman

(<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/17451761/fadli-zon-usul-badan-bahasa-ditarik-ke-kementerian-kebudayaan>)

⁹ Alternatif kebijakan bahasa ini diusulkan Charlie Hanawalt dalam sebuah tulisan makalah "*Planting with the Harvest in Mind: Examining the Potential for Joint National Language and Local Language Planning in Indonesia*". Inti gagasan Hanawalt ialah pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan bahasa nasional dan bahasa daerah sekaligus, terutama dalam perancangan bahasa ibu yang fungsional untuk pendidikan sekolah pada taraf dasar.

Contoh A

Di desa su ada listrik. Beta deng tamang su dapa belajar pada malam hari untuk bikin tugas sekolah. Pas katong balajar sama-sama, listrik mati. Katong bingung karena galap deng seng dapa belajar lai. Katong kasi manyala lilin untuk ganti listrik. Katong dapa balajar kombali deng dapa kasih abis tugas deng pekerjaan rumah untuk bantu orang tua. (diadaptasi dalam bahasa Ambon oleh Noya (2013 dalam komunikasi pribadi)

Contoh A di atas memperlihatkan peragaan teks naratif yang mungkin dilakukan oleh anak Ambon. Pada diri anak Ambon, Aceh, dan lain-lain, hakikat hidup rukun tetap sama; terungkap dengan cerita kegiatan bersama-sama untuk bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolah. Ditumbuhkan pula rasa peduli dan ingin tahu serta rasa syukur akan alam sekitar, termasuk sumber energi untuk cahaya. Dari segi bahasa sebagai teks, tahapannya pun sama: orientasi cerita, komplikasi, dan resolusi. Hanya beda dalam caranya mengenalkan bahasa Indonesia kepada anak SD kelas II. Anak Melayu Riau (baik Kepulauan maupun Daratan) juga dapat diperkenalkan bahasa Indonesia dengan menggunakan cara yang berbeda. Anak Melayu Riau masing-masing dapat belajar berbahasa Indonesia pada tahap awal melalui peragaan bahasa (ibu) mereka. Perhatikan contoh B dan C berikut.

Contoh B

Di kampong saye dah ade listrik. Jadi, saye dan kawan-kawan saye bisa belaja pade malam hari untuk mengerjakan tugas sekolah. Waktu kami lagi belaja bersame, listrik mati. Kami tekejut dan bingung sebab gelap dan kami tak bise belaja. Kami hidupkan lilen sebagai ganti listrik. Kami bise belaja lagi dan menyelesaikan tugas dan kerje rumah untuk menolong orang tue. (diadaptasi dalam Bahasa Melayu Kepulauan oleh Dessy Wahyuni (2013 dalam komunikasi pribadi))

Contoh C

Di kampuong ambo la ado listrik. Ambo jo kawan-kawan la dapek balajar malam aghi untuok mambuek tugas sikola. Wakotu balajar basamo lompu mati. Kami isau dek kolam juo kami ndak dapek balajar le. Kami iduik in lilin panggonti lompu mati. Kami dapek balajar liok dan manyudan tugas dan kojo di uma manolong amak jo ayah. (diadaptasi dalam Bahasa Melayu Daratan Kampar oleh Dessy Wahyuni (2013 dalam komunikasi pribadi)

Bahasa daerah atau apa yang sering disebut bahasa ibu itu diberi ruang untuk membentuk bahasa Indonesia pada anak Indonesia. Bahasa (ibu) Melayu Riau Kepulauan seperti diperagakan pada Contoh B tentu cocok untuk memperkenalkan bahasa Indonesia pada anak setempat. Contoh A dan C tidak layak juga diperagakan oleh atau untuk anak Riau Kepulauan. Demikian pula anak Riau Kepulauan kurang tepat diajarkan berbahasa Indonesia melalui bahasa ibu Melayu Kampar. Anak Kampar tentu lebih mudah menerima pembelajaran tematik terpadu itu melalui contoh C. Perbedaan cara mempelajari bahasa Indonesia itu tetap akan berakhir pada pemerolehan satu ragam bahasa Indonesia nasional.

Memang sangat perlu revitalisasi bahasa ibu. Namun, tanpa berafiliasi dengan bahasa Indonesia seperti penggunaan teks pada contoh bahan pelajaran di atas, revitalisasi bahasa daerah seperti contoh bahasa (ibu) Cia-Cia dengan bahasa asing (Korea) merupakan praktik yang berpotensi menghilangkan atau—sekurang-kurangnya—mengendurkan ikatan kebahasaan bangsa Indonesia karena tidak dilakukan praktik perencanaan bahasa terangkai dengan bahasa daerah dan bahasa negara. Sementara itu, bahasa Cia-Cia merupakan sebuah bahasa daerah yang diakui perkembangannya sebagai bahasa ibu di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara (baca Maryanto dalam Koran Tempo, 21 Februari 2012).

Alih-alih dengan sistem keberaksaraan Indonesia, bahasa Cia-Cia dikembangkan dengan memberlakukan sistem bahasa Korea. Ortografi Hangeul Korea dipilih dengan anggapan bahwa sistem bahasa asing ini lebih tepat diadopsi untuk menyelamatkan bahasa daerah Cia-Cia. Sebagai bahasa ibu, bahasa daerah ini dianggap akan segera punah jika tidak diselamatkan, antara lain dengan mendokumentasikan perbendaharaan kata bahasa daerah ini. Melalui penggabungan bahasa Cia-Cia dan bahasa Korea, telah terbentuk afiliasi linguistik yang berupa sistem tulis seperti 시골라 untuk kata *sekolah* yang oleh penutur bahasa Cia-Cia biasa dituturkan “*sigola*”. Sistem tulis yang dihasilkan dari afiliasi bahasa Cia-Cia Korea ini juga dapat dilihat pada kata *buku* yang oleh penutur bahasa bahasa daerah ini biasa disebut “*boku*”, tetapi sekarang ditulis dalam sistem bahasa korea 보꾸.

Pengembangan afiliasi linguistik bahasa Cia-Cia dengan bahasa Korea tersebut ditemukan pernah memasuki ranah pendidikan sekolah di daerah Baubau, Buton, Sulawesi tenggara. Di daerah itu,

anak-anak sekolah diwajibkan belajar membaca dan menulis dalam bahasa Cia-Cia Korea. Kewajiban sekolah seperti itu telah membuka ruang bahasa baru untuk membentuk penutur bahasa Cia-Cia menjadi bagian dari masyarakat yang berkarakter Korea. Di tengah maraknya program pembangunan karakter bangsa Indonesia, pengelolaan pendidikan sekolah yang tidak berbasis kebahasaan Indonesia itu tampak kontraproduktif. Oleh karena itu, perlu peran Badan Bahasa sebagai lembaga koordinasi kebahasaan untuk menjamin kepastian revitalisasi daerah seperti bahasa Cia-Cia itu terarah dalam kerangka praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah membawa kebaruan dalam hal pentingnya koordinasi kelembagaan tersebut untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Pada sisi lain, kebaruan juga dibawa dalam peraturan perundang-undangan itu. Kebaruan lain dimaksud bukan hanya karena sifat undang-undang yang lebih imperatif dan jauh berbeda dari sekadar komitmen atau sikap para linguis Indonesia seperti yang tertuang dalam dokumen *Politik Bahasa*. Namun, kebaruan praktik perencanaan bahasa ini berkaitan dengan misi penginternasionalan bahasa Indonesia (Pasal 44) dan fasilitasi Pemerintah bagi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing (Pasal 43). Misi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disebut terakhir itu adalah erat kaitannya dalam dua hal sebagai berikut.

Pertama adalah bahasa asing bagi warga negara Indonesia dalam semua hal selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah negara Indonesia. Kedua adalah bahasa asing bagi warga negara asing dalam hal bahasa Indonesia yang dituturkan sebagai bahasa asing. Ihwal yang disebut terakhir ini merupakan fasilitasi Pemerintah bagi warga negara asing yang ingin memiliki kompetensi berbahasa Indonesia. Kebaruan praktik perencanaan bahasa ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).

Kebaruan lebih lanjut juga berkaitan dengan bahasa asing yang tidak hanya dipelajari, tetapi juga dikuasai. Pada awal penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (sebelum tahun 2013), seruan *pelajari bahasa asing* terdengar nyaring dari seluruh unit kerja Badan Bahasa (Balai/Kantor Bahasa) sebagaimana terbukti pada kaos yang dicetak untuk kegiatan unit kerja Kantor Bahasa Maluku Utara ini. Namun, dalam penerapan selanjutnya (setelah 2013), seruan itu berubah menjadi kuasai bahasa asing.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Perubahan spirit gerakan *tigatra bangun bahasa* tersebut, terutama pada gatra bahasa asing, disebabkan oleh kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu bukan sekadar perintah untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa asing, tetapi juga untuk memfasilitasi penggunaan bahasa asing pada ranah publik. Dalam kaita itu, terdapat banyak ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk memfasilitasi penggunaan bahasa asing pada ranah publik. Pasal 29 mengenai bahasa Indonesia yang wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional membolehkan penggunaan bahasa asing untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik (ayat (2)). Pasal 31 mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian juga membolehkan bahasa asing apabila nota kesepahaman atau perjanjian itu melibatkan pihak asing.

Pasal 33 mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah mendorong penggunaan bahasa asing untuk tujuan dan bidang kajian khusus. Selain itu, Pasal 36 mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam penamaan geografi atau rupabumi

Indonesia juga membolehkan penggunaan bahasa asing untuk nama yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Dalam praktik bahasa terangkai ini di Indonesia, Badan Bahasa berperan sangat penting untuk menjaga keberadaan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dalam ranah ruang publik. Di dalamnya bahasa daerah dan bahasa asing merupakan sarana pendukung bahasa Indonesia demi kesinambungan praktik perencanaan bahasa ini. Lebih lanjut, babak baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan abad konsolidasi *trigatra bangun bahasa*. Abad konsolidasi kebahasaan ini diketahui telah dimulai dari awal abad XXI sebelum UU Nomor 24 Tahun 2009 terbit.

2. Gerakan Konsolidasi *Trigatra Bangun Bahasa* dari Awal Abad XXI

Gerakan konsolidasi kebahasaan ini diketahui permulaannya pada awal abad XXI setelah adanya fakta peristiwa Kongres Bahasa Indonesia VII. Kongres ini digelar dari 26 sampai dengan 30 Oktober 1998 di Jakarta dengan pokok bahasan khusus “Memperkuat Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi”. Berikut adalah petikan dari buku Putusan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) yang ketujuh tersebut.

II. BAGIAN KHUSUS

A. Memperkuat Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi

Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dikukuhkan.

Berbeda ihwal pokok bahasan KBI VII itu dengan KBI VI yang digelar pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 di Jakarta. Perbedaan tampak mencolok pada pokok bahasan KBI VI yang masih berkisar tentang pembentukan spirit kebahasaan. Gerakan pembentukan spirit *trigatra bangun bahasa* ini terlihat, misalnya, dari pokok bahasan “Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa”. Berikut adalah petikan dari buku Putusan KBI VI tersebut.

“Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemanfaatan bahasa asing. Ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan masalah yang memiliki hubungan timbal balik dan, oleh karena itu, tidak dapat dipisah-pisahkan.”

Pada peristiwa KBI VI (1993), jejaring tiga jenis bahasa--Indonesia, daerah, dan asing—masih dinyatakan tidak dapat dipisah-pisahkan dan jalinan ketiganya berbentuk timbal balik. Peristiwa kebahasaan itu merupakan bagian dari proses sosial membentuk spirit *trigatra bangun bahasa* yang diketahui permulaannya pada abad XVII. Abad pembentukan spirit kebahasaan (antara abad XVII dan XX) dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Pada bagian ini abad konsolidasi kebahasaan dibahas dengan meninjau kembali gerakan pengukuhan atau peneguhan spirit *trigatra bangun bahasa*, baik secara internal maupun eksternal, dalam praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Urgensi peneguhan spirit kebahasaan ini juga ditandai dengan adanya fakta munculnya isu kebahasaan untuk menjadikan bahasa Indonesia tersubordinasi oleh bahasa Melayu karena adanya klaim pihak tertentu yang masih belum membedakan dan tetap menyamakan bahasa negara Indonesia dengan bahasa Melayu.

2.1 Konsolidasi Internal melalui Gerakan Kebinekaan Bahasa Daerah

Untuk menjelaskan adanya babak baru dalam manifestasi perencanaan bahasa terangkai di Indonesia, data kebahasaan diperoleh dari fakta bahwa inilah abad ke-21 yang kerap disebut disruptif dalam pengertian banyak hal/ihwal yang tercabut dari akarnya. Pada abad ini, secara kebahasaan, Indonesia tengah dilakukan konsolidasi nasional dengan semangat menuju titik keemasan: Indonesia Emas 2045. Keunggulan umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) berbangsa satu—Indonesia—diikhtiarkan melalui kebaikan (budi pekerti) bahasa manusianya, yakni keberagaman bahasa daerah.

Begitu penting bahasa itu sebagai modal sosial dan sumber kekuatan bagi negara untuk terus melaju menuju bangsa (baca: wangsa/manusia bangsawan) Indonesia yang maju dan utama di dalam tata dunia global dewasa ini. Demi kepentingan nasional yang diperteguh atau terkonsolidasi itulah,

Kongres Bahasa Indonesia/KBI XII (Oktober 2023) pun mengusung semangat *Adibasa; Adiwangsa* dengan tema “Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa”.¹⁰

Begitu bergelora gerakan kebinekaan bahasa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Makna tema kongres termutakhir itu ialah bahwa penguatan literasi baca tulis perlu secara terus-menerus ditumbuhkan dari kesadaran tentang kebinekaan yang menjadi fakta keindonesiaan yang meliputi adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan agama. KBI XII telah dilaksanakan untuk mempertegas bahwa bahasa Indonesia bukan hanya pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga penghela ilmu pengetahuan. Pelaksanaan KBI ini sangat bermakna ketika dibaca secara teoretis dari siklus pergerakan sosial (*social movement*) dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Eyerman dan Jamison (1985) telah membantu membaca siklus gerakan sosial kemanusiaan dengan menerapkan tiga siklus yang terperinci sebagai berikut: pembibitan (*gestation*), pembentukan (*formation*), dan konsolidasi (*consolidation*).

Dua siklus pergerakan sosial-kebahasaan (pembibitan dan pembentukan *trigatra bangun bahasa*) akan dibahas lebih mendalam pada bagian analisis selanjutnya. Pada bagian ini konsolidasi nasional-kebahasaan dibahas lebih lanjut dengan memilah dua sasaran gerakan. Gerakan konsolidasi internal berlangsung dalam kaitan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Gerakan konsolidasi eksternal terjadi dalam hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dua sasaran konsolidasi kebahasaan—internal dan eksternal—merupakan manifestasi praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia.¹¹

KBI XII memberikan rekomendasi pertama tentang bahasa dan sastra Indonesia. Rekomendasi keduanya berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah. Bahkan, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya undang-undang bahasa daerah untuk menjamin pewarisan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selain itu, KBI XII juga merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pewarisan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah supaya berkembang lebih sehat dan berdaya guna untuk menghasilkan karya yang bernilai tinggi.

Dalam praktik perencanaan bahasa terangkai ini, konsolidasi *trigatra bangun bahasa*—*bahasa Indonesia yang diutamakan; bahasa daerah yang dilestarikan; dan bahasa asing yang dikuasai*—merupakan sebuah gerakan pembangunan nasional untuk mengaktualisasi nilai Pancasila. Untuk itu, bacaan *Negara Paripurna* yang disusun oleh Yudi Latif (2024) menjadi semacam “tambang emas” (dalam ungkapan Franz Magnis-Suseno) untuk menelisik kebaruan realitas sejarah akan keberadaan bangsa Indonesia yang secara kebahasaan benar-benar telah jauh mendahului keberadaan negaranya.

Berdasarkan pertimbangan atas kondisi bahasa daerah di negara Indonesia, dipandang perlu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan revitalisasi bahasa daerah berskala nasional. Pengambilan kebijakan pemerintah tersebut berlandaskan pada keyakinan bahwa peran negara adalah mengelola (*to manage*) dan menangani problem-problemnya untuk memberi solusi terhadap seluruh aspek (Wayne Parson, 2014). Pengambilan kebijakan revitalisasi bahasa daerah oleh Badan Bahasa dapat dilakukan melalui teori tahapan kebijakan William Dunn dalam Winarno (2012 dalam Yohanantho, 2025).

Untuk mencapai tujuan yang maksimal dan menyesuaikan karakter dengan wilayah kebahasaannya, beberapa model dimunculkan sebagai strategi pelaksanaan program Badan Bahasa. Sun’an Yohanantho melalui artikel “Masa Depan Bahasa Daerah” (<https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/4540/masa-depan-bahasa-daerah>) melaporkan pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah itu sebagai berikut.

¹⁰ Atas tantangan zaman pada abad ke-21, KBI XII mengangkat tema besar “Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa”. Makna tema kongres ini ialah bahwa literasi baca tulis perlu ditumbuhkan dari kesadaran tentang kebhinekaan yang menjadi fakta keindonesiaan dalam adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan agama. Untuk membedah tema KBI XII, telah ditetapkan 37 pemakalah terseleksi. Ihwal literasi bahasa dan sastra dibahas dalam 17 makalah. Sepuluh lainnya membahas ihwal ke-BIPA-an untuk konsolidasi eksternal dengan bahasa asing dalam konteks kebhinekaan global guna menginternasionalkan bahasa Indonesia.

¹¹ <https://www.tempo.co/info-tempo/abad-konsolidasi-trigatra-bangun-bahasa-136861>

a. Model A

Revitalisasi model ini dilakukan dengan berbasis sekolah dan diterapkan kurikulum muatan lokal berkarakteristik sasaran daerah, yaitu (1) daya hidup bahasanya masih aman, (2) jumlah penutur masih banyak, dan (3) masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Pelaksanaan teknis di sekolah diwujudkan dalam kegiatan membaca dongeng dan mendongeng, berpidato menggunakan bahasa daerah, membaca dan menulis aksara daerah, membaca dan menulis cerpen berbahasa daerah, membaca dan menulis puisi berbahasa daerah, menyanyikan tembang berbahasa daerah, membawakan lawakan tunggal, bertanding cerdas cermat, dan melakukan materi lainnya. Dalam penyusunan model ini dilakukan tahapan kegiatan yang meliputi rapat koordinasi, sosialisasi dan pelatihan guru utama, diseminasi dan implementasi di sekolah, dan Festival Tunas Bahasa Ibu (Badan Bahasa, 2022, hlm. 44--45).

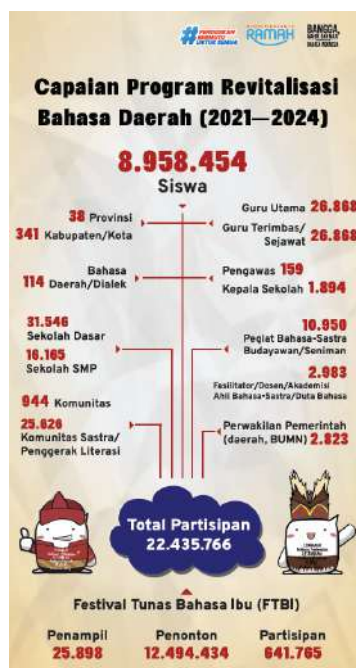
b. Model B

Revitalisasi bahasa daerah model B dilakukan terhadap bahasa daerah yang berkarakteristik (1) daya hidup bahasanya tergolong rentan, (2) jumlah penutur relatif banyak, dan (3) bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain. Pendekatan yang dilakukan untuk melaksanakan model B ini ialah program pembelajaran berbasis pencelupan (*immersion program*), pembelajaran berbasis praktik satu hari berbahasa daerah (*one-day language practice*), pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran berbasis keagamaan, pembelajaran berbasis seni dan budaya, dan pembelajaran berbasis kreativitas. Program revitalisasi model B diimplementasikan dalam tiga tahapan besar, yakni survei dan koordinasi, pelatihan dan pembelajaran, serta pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu (Badan Bahasa, 2022, hlm. 44--45).

c. Model C

Revitalisasi bahasa daerah model C dilakukan terhadap bahasa daerah yang berkarakteristik (1) daya hidup bahasanya tergolong dalam kategori mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis serta (2) jumlah penuturnya sedikit dan sebaran wilayah tuturannya terbatas. Basis kegiatannya meliputi komunitas dan masyarakat (keluarga/individu). Tahapan yang ditempuh meliputi persiapan revitalisasi melalui survei dan koordinasi, pembelajaran atau pelatihan, aksi revitalisasi, pelaporan hasil, dan pengembalian mutu (Badan Bahasa, 2022, hlm. 44--45).

Konsolidasi internal melalui revitalisasi bahasa daerah dengan tiga model pelestarian bahasa tersebut diperoleh capaian gerakan selama periode 2021—2024 yang terangkum sebagai berikut.



Sumber: Bahan Pameran Badan Bahasa, Kemendikdasmen pada 25 April 2025

Untuk merevitalisasi bahasa daerah, salah satu isu dalam permasalahan itu ialah ancaman kepunahan aksara nusantara. Pada pekan pertama September 2023 (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-September-2023-218.pdf), Dinar Wahyuni (Analisis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI) menyampaikan isu ancaman kepunahan aksara nusantara. Pada saat ini, menurut Dinar Wahyuni, aksara nusantara makin terpinggirkan oleh karena penggunaan aksara latin dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan konsolidasi internal dilakukan, antara lain, dalam kaitan dengan isu ancaman kepunahan aksara nusantara tersebut. Dalam kaitan itu, kegiatan membaca dan menulis aksara daerah merupakan salah satu agenda penerapan tiga model pelestarian bahasa daerah tersebut. Untuk itu, program Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dilakukan secara berjenjang sebagai ajang apresiasi dan mengangkat prestise bahasa daerah sekaligus penghargaan kepada generasi tunas muda bahasa daerah yang berbakat dalam mendongeng, menyanyikan lagu daerah, menulis dan membaca puisi, menulis cerita pendek dan surat, membaca dan menulis aksara daerah, berkomedi tunggal, dan juga berpidato.¹²

2.2 Konsolidasi Eksternal melalui Gerakan Kebinekaan Global

Telah dijelaskan bahwa gerakan konsolidasi internal dilakukan dengan fokus perhatian pada upaya melestarikan bahasa daerah. Pada sisi eksternalnya, melalui beragam program ke-BIPA-an yang digelar secara internasional, gerakan konsolidasi kebahasaan ini memperkuat atau memperkukuh posisi bahasa Indonesia dengan berstatus sebagai bahasa asing bagi masyarakat penutur non-Indonesia. Pada posisi bahasa Indonesia ini, sekarang makin terbuka luas—meskipun tidak kecil tantangannya baik di tingkat internal maupun eksternal—sehingga tetap sangat besar peluang bahasa Indonesia untuk terus melaju maju agar sejajar fungsinya sebagai *lingua franca plus* (istilah E. Aminudin Aziz, 2024)¹³ di dunia global dengan enam bahasa resmi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Arab, dan Rusia).

Pada posisi berfungsinya sebagai *lingua franca plus* tersebut, bahasa Indonesia dapat dipastikan makin terkonsolidasi sebagai penghela ilmu pengetahuan di tengah keberagaman tidak hanya pada tataran lokal dan nasional, tetapi juga tingkat regional dan dunia global. Untuk itulah, pelaksanaan KBI XII (2023) dipandang sangat distingtif dalam hal berkeindonesiaan dengan semangat *Adibasa; Adiwangsa*. Dalam hal peristiwa akbar ini, KBI XII merupakan salah satu ajang perjumpaan antara pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di bidang kebahasaan untuk merawat semangat *Trigatra Bangun Bahasa*.

2.2.1 Pentingnya Ruwatan Nasional untuk Maju ke Dunia Global

Perjumpaan akbar pada KBI XII tersebut juga tampak bersifat konsolidasi atas semangat berbahasa Indonesia, daerah, dan asing dalam rangka transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Untuk itu, mengingat abad ke-21 yang amat disruptif, KBI XII sangatlah urgen untuk dilaksanakan guna melakukan ruwatan nasional: pemulihan kembali pada keadaan semula.

Betapun pentingnya bahasa Inggris, misalnya dalam kehidupan sosial masyarakat pemilik/penutur bahasa Indonesia, tetaplah didudukkan dan difungsikan di ruang publik sebagai bahasa asing yang perlu dikuasai dengan menempatkannya di bawah bahasa negara. Begitu pula bahasa Arab yang tak-kalah pentingnya dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan berbahasa daerah, keberadaan dan kemanfaatan bahasa Jawa, Melayu, dan sebagainya tidak boleh melampaui kedudukan dan fungsinya untuk menyangga keberadaan bahasa Indonesia.

¹² Risalah Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Nomor 1, Februari 2024) bertajuk “Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia”. https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/resource/doc/files/Risalah_Kebijakan-Arah_Baru_RBD_Menekan_Laju_Kepunahan%C2%A0BD%C2%A0di%C2%A0Indonesia.pdf

¹³ Istilah *lingua franca plus* dimuat dalam risalah Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Nomor 8, September 2024) bertajuk “Menguatkan Langkah Internasionalisasi Bahasa Indonesia Pasca Penetapan sebagai Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO”. https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/resource/doc/files/risalah_nomor_8.pdf

Demi terlaksananya UU No. 24 Tahun 2009 (baca kembali ketentuan Pasal 1), bahasa Jawa dan bahasa Melayu serta bahasa Tetun—misalnya—yang dituturkan secara turun-temurun di luar wilayah NKRI haruslah tetap dipandang kedudukannya masing-masing sebagai bahasa asing. Dalam kaitan bahasa asing itu, gerakan revitalisasi daya hidupnya bahasa daerah—jika merujuk pada sebelas tangga kehidupan suatu bahasa dalam formula *Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale*/skala EGIDS ((0) skala *International*, (1) *National*, (2) *Provincial*, (3) *Wider Communication*, (4) *Educational*, (5) *Developing*, (6a) *Vigorous* dan (6b) *Threatened*, (7) *Shifting*, (8a) *Moribund* dan (8b) *Nearly Extinct*, (9) *Dormant*, serta (10) *Extinct*)—haruslah terangkai dengan gerakan pengutamaan bahasa negara Indonesia. Hanya bahasa Indonesia yang diberdayakan oleh negara, seturut amanat konstitusi, untuk memiliki daya hidup sebagai bahasa internasional.

Gerakan penginternasionalan bahasa Indonesia pada konsep awal di titik nolnya sebagai pendekatan *lingua franca plus* tentu juga perlu didukung/ditopang dengan adanya kekuatan daya hidup bahasa daerah yang sedang direvitalisasi di setiap provinsi agar mencapai tangga kehidupan kedua dalam skala skala EGIDS tersebut. Tangga daya hidup pada setiap bahasa daerah tentu tidak dirancang capaiannya hingga pada level pertama di tingkat nasional. Itu semata-mata karena bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang atau dikembangkan dari bibit-bibit unggulnya dalam semua bahasa daerah (di) Indonesia.

Sangatlah tepat tiga subtema bahasan KBI XII—revitalisasi bahasa daerah, literasi bahasa dan sastra, penginternasionalan bahasa Indonesia—telah disajikan oleh pemangku kepentingan yang tentu sangat peduli dengan pentingnya konsolidasi kedudukan dan fungsi tiga bahasa: Indonesia, daerah, dan asing. Konsolidasi semangat *Trigatra Bangun Bahasa* ini berlangsung pada abad ke-21 yang amat menggoda untuk mengubah tatanan kebahasaan, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009. Bagi pemangku kepentingan yang telah tergoda oleh abad ke-21 yang sangat disruptif, pelaksanaan KBI ini menjadi momentum melakukan ruwatan nasional atau pemulihan kembali pada amanat undang-undang tersebut.

2.2.2 Fenomena Disruptif terhadap Spirit Trigatra Bangun Bahasa

Melalui momentum KBI XII (Oktober 2023), memori kolektif telah dipulihkan kembali. Bahasa Arab, misalnya, tetaplah menjadi bahasa asing yang dikuasai sejak jejaknya berabad-abad silam di Barus. Penguasaan bahasa asing itu akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Dalam kaitan itu, bahasa Melayu pun tetaplah lestari sebagai bagian keragaman bahasa daerah dalam peradaban Nusantara yang berkeindonesiaan. Itu semua adalah demi keutamaan bahasa (negara) Indonesia guna menjaga transformasi kehidupan sosial pada bangsa Indonesia agar terus melaju untuk Indonesia maju. Jika bukan demikian halnya, agaknya akan terjadi kemunduran di bidang pembangunan kebahasaan di Indonesia.

Adalah fakta adanya disrupsi kebahasaan bahwa alih-alih menjunjung bahasa Indonesia secara murni dan konsekuen, acapkali muncul keinginan sebagian warga masyarakat untuk mempromosikan bahasa Melayu (Indonesia-Melayu) sebagai bahasa internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah fakta kemunculan promosi bahasa Melayu yang telah melibatkan elemen negara/bangsa Indonesia. Kemunculannya pun telah menimbulkan kontroversi atau perdebatan publik dalam konteks kebahasaan dan kenegaraan di Indonesia. Gambar ini menunjukkan fakta disrupsi kebahasaan dalam hal bahwa Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan usulan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Disebutkan bahwa Malaysia akan segera berbicara dengan pemimpin ASEAN untuk membahas usulan ini. Pada kesempatan ini, yakni pada 1 April 2022, ia bertemu dengan Presiden



Republik Indonesia ketika itu: Joko Widodo.

(<https://news.detik.com/berita/d-6011399/pm-malaysia-sebut-jokowi-setuju-perkuat-bahasa-melayu>).

Atas disrupsi kebahasaan yang muncul dari negara tetangga itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia Nadiem Makarim ketika itu memberikan alasan mengapa ia menolak permintaan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu

sebagai bahasa perantara kedua negara dan bahasa resmi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Permintaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Menurut Menteri Nadiem, bahasa Indonesia lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan sejarah, hukum, dan linguistik.¹⁴

Gambar ini juga menunjukkan fakta terkait fenomena disrupsi kebahasaan di atas. Keberadaan kamus dimaksud telah menimbulkan reaksi pada 11 Agustus 2014 dengan diajukannya keberatan oleh



Pemerintah Indonesia kepada Brunei atas pencantuman puluhan ribu kata bahasa Indonesia dalam Kamus Bahasa Melayu yang diterbitkan pemerintah Brunei. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wiendu Nuryati, mengatakan sebanyak 62.000 jumlah kosa kata bahasa Indonesia yang dicantumkan dalam Kamus Brunei Melayu Nusantara.

(https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140811_kamus_brunei)



1. NUSANTARA: Seluruh wilayah Indonesia Raya
2. MELAYU RAYA: Seluruh wilayah Alam Melayu
3. NUSANTARA RAYA: Nusantara + Melayu Raya
4. "Bahasa Melayu Nusantara"

Fenomena disrupsi kebahasaan tampak berlanjut; agaknya, tidak berhenti. Gambar ini memperlihatkan salah satu paparan akademis dalam kegiatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bersama dengan Forum Guru Besar Indonesia (FDGBI) yang menyelenggarakan Musyawarah dan Seminar Internasional FDGBI IV pada 2019 ketika kegiatan Dies Natalis Unesa ke-55 juga dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Surabaya itu menghadirkan guru besar baik dari luar dan dalam negeri, di antaranya: Prof Drs. Koentjoro, MBS, Ph.D., Prof. Dr. Koh Young Hun, Prof. Dr. Setya Yuwana, M.A., Prof. Dr. Haris

Supratno, Prof. Kamaruddin Said, Asst. Professor Siripu Maneechukate, serta Endina Asri Widratama.

Dalam kaitan dengan peristiwa akademis FDGBI itu, Prof. Dr. Setya Yuwana, M.A. menuturkan bahwa berdasarkan rekomendasi munas antar-profesor, kegiatan tersebut terlaksana sebagai bentuk menyatukan bahasa Melayu melalui berbagai aspek. Untuk itu, Unesa ditunjuk sebagai tuan rumah guna melaksanakan musyawarah internasional yang membahas bahasa Indonesia Melayu sebagai bahasa ilmiah internasional. Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk musyawarah internasional pada 4 sampai dengan 7 November 2019 yang dilaksanakan di Unesa, serta melibatkan berbagai guru besar dari berbagai negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura. Forum ini diikuti 154 guru besar dari 31 delegasi perguruan tinggi.

(<https://www.unesa.ac.id/guru-besar-siap-sukseskan-bahasa-indonesia-melayu-sebagai-bahasa-ilmiah-internasional>)



Fenomena disrupsi kebahasaan seperti itu memunculkan kontroversi atau perdebatan publik yang menunjukkan adanya kegamangan implementasi konstitusi negara Indonesia. Kegamangan tersebut memberikan petunjuk bahwa bahasa Indonesia masih terikat dengan fakta sejarah kemelayuan yang ada dari seputar Selat Malaka. Keterikatan itu berkelindan dengan

¹⁴ Artikel yang memuat reaksi atas disrupsi kebahasaan ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Alasan Nadiem Tolak Melayu Jadi Bahasa Resmi ASEAN: Bahasa Indonesia Terbesar di Asia Tenggara", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/16473561/alasan-nadiem-tolak-melayu-jadi-bahasa-resmi-asean-bahasa-indonesia-terbesar>.

terputusnya sejarah pertumbuhan bibit-bibit kebahasaan yang membekali bahasa Indonesia dalam lini masa hingga terbentuknya spirit trigatra bangun bahasa.

3. Abad Pembentukan Spirit Trigatra Bangun Bahasa: Antara XVII dan XX

Dalam pengantar buku *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*, Lukman Ali (1998) berkata bahwa sejarah kehidupan bahasa negara ini telah diisi dengan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Dengan merunut sejarah ejaan bahasa Indonesia, dapat diketahui bahwa abad pembentukan spirit *trigatra bangun bahasa* adalah antara abad XVII dan XX. Pada awal abad XX terdapat peristiwa kebahasaan yang di dalamnya sistem ejaan Latin telah ditetapkan secara resmi melalui karya tulis Ch. A. van Ophuijsen (1901) dan diberlakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Pada abad XX, dilakukan pula penyempurnaan tata ejaan Latin itu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, abad XVII merupakan awal pengenalan sistem ejaan tersebut oleh bangsa Belanda di Indonesia. Pengenalan sistem ejaan Latin itu sangat berpengaruh pada kerangka pembentukan spirit *trigatra bangun bahasa*. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas tiga hal terkait dengan (1) masa awal pengenalan sistem ejaan yang berlaku pada bahasa Indonesia, (2) kerangka umum spirit kebahasaan tersebut di Indonesia, dan (3) tokoh kunci dalam perjuangan pergerakan sosial terbentuknya bahasa persatuan Indonesia.

3.1 Pengenalan Aksara Latin di Indonesia pada Abad XVII

Adalah kamus Frederick de Houtman yang berisi rujukan penelitian ilmiah atas situasi kebahasaan pada awal abad XVII (Suratminto, 2012). Situasi kebahasaan pada saat itu disebut sebagai peristiwa awal mula terbentuknya spirit *trigatra bangun bahasa: bahasa Indonesia yang diutamakan, bahasa daerah yang dilestarikan, dan bahasa asing yang dikuasai*. Spirit kebahasaan ini terbentuk karena sejak awal abad XVII itu ada kontak bahasa (asing) Belanda yang memungkinkan terjadinya standardisasi sistem ejaan bahasa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, pengutamaan bahasa Indonesia merujuk pada penggunaan bahasa Indonesia dengan berbasis standardisasi keberaksaraan Latin.

Sebagai kitab pengetahuan kebahasaan, kamus de Houtman merupakan langkah awal yang dapat dirujuk dengan pemberlakuan sistem ejaan van Ophuijsen (1901) sebagai salah satu bentuk usaha pembakuan bahasa Indonesia pada abad XX. Dalam hal karya tulis Frederick de Houtman tersebut, Suratminto (2012) menjelaskan pengalaman penulis/penyusun kamus itu sebagai “musibah yang membawa berkah”.¹⁵ Keberkahan dimaksud di sini ialah pengetahuan empiris mengenai situasi kebahasaan Melayu pada saat Frederick de Houtman dipenjarakan oleh Sultan Aceh. Frederick memberikan contoh bahwa tidak boleh ada putus asa, tetapi pikiran positif, pada orang yang sedang menghadapi cobaan. “*Dispereert niet*. Itu semboyan mereka.” Demikian yang disebutkan oleh Lilie Suratminto dengan menegaskan pentingnya penelitian situasi kebahasaan Melayu pada awal abad XVII.

Penyusunan kamus dwibahasa (Belanda-Melayu) oleh de Houtman itu menandai awal masa pergerakan-sosial kebahasaan yang--pada satu sisi—membentuk bahasa Belanda untuk menjadi bahasa asing dan—pada sisi lain—bahasa Melayu untuk menjadi bahasa daerah di Indonesia. Proses terbentuknya bahasa daerah dan bahasa asing ini berlangsung di bumi Nusantara yang berkeindonesiaan. Proses ini tidak terjadi di luar wilayah Indonesia. Hanya di dalam wilayah NKRI yang dikenal sekarang ini, bahasa (daerah) Melayu memperoleh persepsi linguistik lebih awal dari penutur bahasa (asing) Belanda.

¹⁵ Lilie Suratminto (2012) dalam Prosiding the 4th international conference on Indonesian studies unity, diversity and future.

Contoh kalimat-kalimat dalam kamus Frederick de Houtman:

<i>God geve u goeden dag, Jan.</i>	Alla bry selamat, Johan.
<i>Ende u alsoo Hermes.</i>	De kamoe poen begitoe, Hermes.
<i>Goeden dach gheve u God.</i>	Ary baick de bry alla kamoe.
<i>Hoe vaerby?</i>	Beggy manna adda pacaniera
<i>Tot uwen gebode</i>	lang somba pacaniera.

Lebih lanjut, data bahasa Indonesia dapat diperoleh dari persepsi linguistis atas contoh kalimat-kalimat dalam kamus de Houtman sebagaimana dicatat oleh Suratminto tersebut. Persepsi linguistis itu dijelaskan (dalam komunikasi pribadi pada 18 April 2015) oleh Dzien Nuen *Almisri*, seorang sarjana Bahasa Belanda yang bekerja pada Badan Bahasa, sebagai berikut

Tuhan (Allah) memberimu hari yang baik, Jan/Johan/John/Yohanes.

Dan Anda juga, Hermes.

Tuhan (Allah) memberimu hari baik.

Seberapa jauh?

Pada perintah-perintah-Mu

Data sejarah bahasa Indonesia yang diperoleh dari Frederick de Houtman itu menunjukkan bahwa penyusun kamus tersebut merupakan pembawa huruf Latin ke Indonesia. Sebelumnya, Antonio Pigaffetta adalah pembawa huruf Latin dari Italia. Demikian pula Joannes Roman, sebagaimana dicatat dalam pengantar buku *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Lukman Ali (1998).¹⁶ Namun, pengenalan huruf Latin oleh Frederick de Houtman itu berlangsung sebelum sistem ejaan ini ditetapkan secara resmi dan diberlakukan di seluruh Indonesia (Hindia Belanda) melalui karya Ch. A. van Ophuijsen (1901). Paling sedikit selama empat abad telah terjadi pembentukan sistem kebahasaan ini, yakni antara abad XVII dan XX. Pada abad XX penyempurnaan bentuk ejaan Latin dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perlu disebutkan di sini bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, gerakan *trigatra bangun bahasa* merupakan spirit kehidupan berbahasa. Hanya dengan pemanfaatan tiga jenis bahasa—bahasa Indonesia yang diutamakan, bahasa daerah yang dilestarikan, dan bahasa asing yang dikuasai—ada harapan bahwa dapat dibangun semangat berkehidupan sosial itu di *ranah publik modern*.¹⁷ Spirit atau semangat berkehidupan sosial-kebahasaan tersebut diperoleh sebagai hasil penelusuran terhadap isi dokumen *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara* yang pada pokoknya telah mengatur kehidupan berbahasa di dalam ranah publik dimaksud.

Spirit atau semangat berkehidupan sosial-kebahasaan di Indonesia tumbuh pesat, seturut suksesnya pengenalan aksara Latin oleh Frederick de Houtman yang memang erat kaitannya dengan Eropa (Belanda) dalam hal kemajuan teknologi perkapalan, navigasi, dan inovasi lain. Ketika memasuki

¹⁶ Seturut dengan pengantar buku *Ikhtisar Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia* yang ditulis oleh Lukman Ali (1998), pembawa huruf Latin sebelumnya adalah Pigaffetta, yang pada awal abad XVI membuat sistem ejaan bahasa Melayu. Demikian pula pengenalan huruf latin oleh Joannes Roman.

¹⁷ Istilah *ranah publik modern* merujuk pada konsep Yudi Latif (2020). Dalam buku *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan*, tepatnya pada bagian kedua: *akar-akar pendidikan di Indonesia*, dibahas secara khusus ihwal *ruang publik modern dan kepeloporan guru*. Yudi Latif menjelaskan adanya perkembangan “ruang publik intelegensia” di wilayah Hindia-Belanda dari kemunculan semula yang berbasis uang dengan sebutan *kelas borjuis berbasis uang/moneyed bourgeois class*. Perkembangannya lebih lanjut dijelaskan dengan adanya pengenalan bahasa Belanda yang *baik dan benar* di samping standardisasi bahasa (daerah) Melayu dan Jawa. Namun, sejak 1860 dan seterusnya, pihak Belanda menetapkan dan menjalankan fokus utamanya pada “kebijakan standardisasi bahasa Melayu yang (dianggap) ‘benar’ dan ‘asli’ dengan membuat kamus-kamus bahasa Melayu ‘tinggi’ (bahasa Melayu yang dipakai di kepulauan Riau, Semenanjung Malaya (Malaka, Johor), dan pantai barat Kalimantan)”. Dengan diilhami oleh klub-klub orang Belanda, menjelang akhir abad XIX, klub Mufakat Guru (klub kaum pribumi) muncul dan beredar di seputar wacana intelektual yang berhubungan, antara lain, dengan masalah bahasa dan perbaikan sekolah. “Keberadaan embrio ruang publik dan praktik-praktik diskursif di Hindia inilah yang memungkinkan perkembangan ruang publik intelegensia pribumi pada awal abad ke-20,” kata Yudi Latif (2020:98).

pertengahan abad XVII, Belanda diketahui tampil sebagai penguasa dunia dalam perdagangan terbesar yang mampu menggantikan Portugis di berbagai pos kekuasaan dagang. Semua kekuatan pesaing Eropa lainnya dipinggirkan, kecuali Inggris (British). Kisah sejarah dunia ini ditulis oleh Jun Russel dalam buku *The Banda Islands: Hidden Histories & Miracles of Nature* (2017), sebagaimana diceritakan kembali oleh Yudi Latif (dalam komunikasi pribadi pada 13 Juli 2023).

Dalam hal peristiwa sejarah dunia, Belanda ternyata dicatat tidak hanya bergerak ke belahan Timur untuk melakukan kontak perdagangan dunia dengan kesultanan India dan Nusantara (Hindia Timur). Akan tetapi, Belanda juga bergerak ke kawasan Amerika Utara dan berhasil menguasai berbagai wilayah yang disebut New Holland. Namun, kawasan Amerika Utara ini dipandang tak-sepenting pusat rempah (Hindia). Pada akhirnya, kota New Amsterdam di pulau Manhattan berhasil diduduki Inggris pada tahun 1664 dan berganti menjadi New York. Dalam situasi itu, Belanda dan Inggris memasuki era Perjanjian Breda (1667) yang menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat (semula dalam kekuasaan Belanda) dengan Pulau Run di Kepulauan Banda (semula dalam kekuasaan Inggris).

Seperti halnya Perjanjian Breda yang memasukkan kepulauan Banda di Maluku dalam wilayah jajahan Belanda tersebut, penandatanganan Traktat London (1824) berimbas terjadinya *tukar guling* antara Bengkulu (semula dalam kekuasaan Inggris) dan Singapura (semula dalam kekuasaan Belanda). Dalam hal itu, Nothofer (2013) juga memberikan konfirmasi bahwa imbas dari Traktat London itu ialah terbelahnya dunia (bahasa) Melayu “dengan Selat Malakka (sic) sebagai batas antara daerah jajahan Belanda dan jajahan Inggris”. Senada dengan Nothofer, pandangan Yudi Latif (2023) telah mengonfirmasi bahwa kisah kekuasaan Belanda dan Inggris itulah yang menjadi narasi titik tolaknya menuju pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahasa negara Indonesia secara resmi terbentuk pada abad XX, antara lain melalui peristiwa akbar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan pembentukan BPUPKI pada 1945. Salah satu titik masuknya lini masa pembentukan bahasa Indonesia ini juga memperoleh konfirmasi dari Bernd Nothofer dalam buku *Pengantar Etimologi* (2013) dengan merujuk peristiwa geopolitik abad XIX akibat penandatanganan kontrak (perjanjian) antara Belanda dan Inggris (*Treaty of London*, 1824). Akibatnya ialah bahwa wilayah Indonesia (Hindia Belanda) dipisahkan dari wilayah yang lain. Namun, bukanlah demikian halnya dengan wilayah penuturan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

3.2 Spirit Kebahasaan di Indonesia: *Tidak Dipisahkan, tetapi Dibedakan*

Bentuk negara *Indonesia* dapat dirujuk secara linguistik dengan apa yang disebut Heinz Kloss (1968 dalam Maryanto, 2010) sebagai negara *endoglosik*. Kloss memilah negara menjadi dua kelompok: negara endoglosik dan negara eksoglosik. Negara eksoglosik disebut juga sebagai negara *multi-national*. Contoh terdekat untuk negara eksoglosik itu adalah Singapura, yang mengangkat empat bahasa resmi: Cina (Mandarin), Melayu, Tamil, dan Inggris yang masing-masing merepresentasikan entitas kebangsaan penuturnya.

Negara Indonesia didirikan atas dasar nasionalisme yang dibangun dengan strategi kebahasaan. Dari segi teori pembentukan negara, selain bahasa, juga ada ras dan agama yang mungkin saja dipilih untuk membangun nasionalisme (Anwar, 2008 dalam Mahsun 2014 melalui komunikasi pribadi). Dalam hal ini, Indonesia berdiri tidak seperti Republik Iran, yang memilih agama sebagai strategi mencari dan menemukan kebenaran identitas negara dan jati diri bangsa. Islam memang diakui sebagai agama terbesar di Indonesia, sebagaimana terlihat dari pesta masyarakat pada setiap hari raya Lebaran. Meskipun demikian besarnya, agama Islam tidak dijadikan fondasi pendirian Indonesia. Buktinya ialah penghapusan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda 1928 merupakan refleksi penerapan teori bahwa negara bangsa Indonesia dibangun atas kesadaran bahasa, bukan ras dan/atau agama. Hingga saat ini, kesadaran untuk berbahasa Indonesia sebagai bahasa utama—tidak berbahasa lain-lain dalam hal bertanah air (bernegara) dan berbangsa Indonesia—diakui sebagai satu pilar penting bagi persatuan Indonesia. Satu pilar itu masih ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 walaupun konstitusi Indonesia beberapa kali diubah. Pernyataan konstitusi itu menetapkan bahwa Indonesia tidak akan berubah menjadi sebuah negara multi-national seperti Singapura. Dalam kerangka kebahasaan, Indonesia--yang dapat

dikategorikan secara utuh sebagai negara endoglosik--mengakui satu bahasa resmi kenegaraan dan—sekaligus—kebangsaan itu, yaitu bahasa Indonesia, yang tumbuh berkembang atau dikembangkan di dalam wilayah negara (kesatuan) bangsa Indonesia.



Kerangka dasar terbentuknya spirit trigatra bangun bahasa (diekstrak dari beragam sumber)

- ❑ Ihwal bahasa dan perencanaannya secara terangkai (bahasa Indonesia, daerah, dan asing) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: pengaturan atas empat simbol kenegaraan (bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan) yang saling bertautan sangat erat dengan acuan pertama pada bendera Merah Putih sebagai lambang keberanian dan kesucian.
- ❑ Hubungan hakiki antara bahasa dan sila Ketuhanan ... ialah terciptanya manusia—melalui kisah penciptaan Adam—sebagai khalifah di muka bumi dengan kemampuan berbahasa yang dianugerahkan (diajarkan) secara langsung oleh Tuhan YME untuk menghela ilmu pengetahuan (menyebutkan nama-nama benda). Di hadapan para malaikat (kecuali di depan makhluk setan yang sangat sombong), manusia (Adam) memperoleh pengakuan dan penghormatan sebagai khalifah di muka bumi karena anugerah kemampuan atau pengetahuan berbahasa itu.
- ❑ Hubungan hakiki antara bahasa dan sila Kemanusiaan ... ialah dijadikannya (dalam kesejagatan) umat manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Bahasa merupakan cara pandang atau orientasi kehidupan manusia yang paling sedikit secara universal berhubungan dengan dimensi ruang dan waktu.
- ❑ Hubungan hakiki antara bahasa dan sila Persatuan ... ialah diikrarkannya teks Sumpah Pemuda 1928 (butir teks ketiga) dan diserukannya dalam lagu kebangsaan pada stanza I "Marilah kita berseru Indonesia bersatu" dalam kehidupan majemuk baik di tingkat nasional (dengan kemajemukan bahasa daerah) maupun tingkat global (dengan kemajemukan bahasa asing).
- ❑ Hubungan hakiki antara bahasa dan sila Kerakyatan ... ialah ditetapkannya bahasa negara yang merupakan bahasa Indonesia dan dimanfaatkannya bahasa negara ini sebagai bahasa utama dalam kehidupan bernegara, tidak hanya untuk mewujudkan persatuan, tetapi juga untuk mengupayakan terwujudnya tujuan "Indonesia bahagia", sebagaimana disebutkan dalam lagu kebangsaan *Indonesia Raya* pada stanza II.
- ❑ Hubungan hakiki antara bahasa dan sila Keadilan ... ialah ditetapkannya Indonesia sebagai negara kesejahteraan dalam keadilan sosial untuk mewujudkan tujuan akhir berkeindonesiaan, yaitu "Indonesia abadi", sebagaimana disebutkan dalam lagu kebangsaan *Indonesia Raya* pada stanza III.

Dengan hanya ada satu bahasa nasional (negara bangsa), bahasa-bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di daerah etnis Melayu, Jawa, Sunda, dan etnis-etnis lainnya ditempatkan pada posisi atau status bahasa daerah untuk menyangga atau menopang bahasa nasional. Pada posisi itu, bahasa-bahasa subnasional dapat dipandang sebagai satu kesatuan organ dengan bahasa nasional. Kesukuan bangsa Indonesia telah dibuka sekat-sekatnya melalui bahasa—baik daerah maupun nasional—yang dibedakan hanya menurut kedudukan fungsinya dan tidak dipisah-pisahkan keberadaan semuanya secara hakiki. Terhadap kondisi Indonesia yang multi-etnis, strategi kebahasaan yang bersifat organik (istilah *bahasa organik* dari Wiratno 2013 dalam komunikasi pribadi) ini merupakan cara pandang yang sangat tepat untuk mengembangkan dan membina serta melindungi bahasa daerah atau bahasa ibu dalam hubungannya dengan bahasa negara Indonesia.

Cara pandang itu sejalan dengan kerangka teori bahasa sebagai teks. Dari sudut pandang teori teks, bahasa merupakan realisasi pola-pola berpikir (baca Martin dan Rose, 2008) dalam situasi sosial yang terikat dengan tiga dimensi register dari teori Halliday: medan/*field*, pelibat/*tenor*, dan sarana/*mode*. Perlu disebutkan di sini bahwa dimensi *field* dan *tenor* itu berperan membentuk makna ideasional dan interpersonal. Sementara itu, dimensi ketiga (*mode*) disebut sebagai bagian bahasa yang diperankan untuk membentuk makna tekstual. Bahasa ibu dan bahasa negara secara teoretis mampu bantu-membantu atau saling menopang untuk mewujudkan bahasa itu sebagai teks.

Ketika sebuah teks bermaksud membentuk makna interpersonal tertentu, seperti makna resiprokal (*'reciprocity'* dalam istilah Martin dan Rose, 2008), dalam pembuatan teks itu siapa pun yang terlibat (*tenor*) boleh menentukan hubungan kesetaraan atau keakraban melalui pemilihan register bahasa. Sebagai teks, bahasa juga berada di dalam ranah atau medan (*field*) tertentu yang memuat makna ideasional mengenai pengalaman atau pengetahuan dunia nyata. Dalam kerangka teori teks, makna ideasional itulah yang mewujudkan apa yang dirumuskan dalam kebijakan bahasa untuk pendidikan nasional sebagai *bahasa penginehla (ilmu) pengetahuan*.

Pada awal abad XVII, memang, kebanyakan buku masih ditulis dengan menggunakan huruf Jawi (Pegon) yang tentunya tidak dapat dimengerti oleh orang Belanda. Pada masa awal kedatangan bangsa Eropa di bumi Nusantara tersebut, belum ada ejaan bahasa Melayu dalam huruf Latin. Yang menarik dari ulasan tentang kamus Frederick de Houtman ialah bahwa kamus ini memberikan kesadaran lebih pada kesamaan akar bahasa di Malaysia dan Indonesia. "[...] secara kultural kedua bangsa ini **tidak dapat dipisahkan**," tegas Suratminto. Benar adanya bahwa semangat atau spirit berbahasa di Malaysia dan berbahasa di Indonesia tidak dapat saling dipisahkan.

Alih pemisahan (*separation*), apalagi dengan bangsa serumpun di wilayah geografis yang sebelah, bangsa Indonesia perlu dibuat **pembedaan** (*differentiation*). Dari perspektif kebahasaan, apa yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain dan—bahkan—pada wilayah keserumpunan bahasanya? Akar bahasa yang oleh Suratminto disebut sebagai hal yang sama di Malaysia dan Indonesia itu telah berkembang menjadikan bahasa yang berbeda. Perbedaan kedua hal berbahasa Melayu dapat disebutkan dengan merujuk pada peristiwa penyusunan kamus de Houtman di Aceh, tepatnya di dalam penjara Benteng Pidi (selama 26 bulan). Perbedaan itu sangat mencolok dari peristiwa pergerakan pembentukan bahasa persatuan Indonesia.

3.3 Dua Tokoh Kunci dalam Pergerakan Bahasa Persatuan Indonesia

Dari kamus Frederick de Houtman, peristiwa kebahasaan pada awal abad XVII itu dapat diambil hikmah/kebijaksanaan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya terbentuk oleh karena kontak dengan bahasa (asing) Belanda. Akan tetapi, peristiwa kontak bahasa (asing) Belanda itu juga berkelindan dengan terbentuknya bahasa Melayu (dan bahasa daerah lain) untuk mengisi spirit keberagaman dalam hal bahasa daerah itu di Indonesia. Untuk itu, perlu ditegaskan kembali di sini bahwa Indonesia bukan merupakan negara seperti Afrika Selatan, yang berdiri di atas fondasi ras untuk membangun nasionalisme.

Kebangkitan bangsa Afrika Selatan diperjuangkan melalui gerakan anti-diskriminasi ras atas orang-orang kulit hitam seperti perjuangan yang dilakukan tokoh kunci Nelson Mandela. Tidak demikian halnya perjuangan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia tidak dapat dan agaknya tidak mungkin disamaratakan hanya sebagai ras Melayu. Karena itulah, kata *Melayu* tidak digantikan oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dalam naskah putusan Kongres Pemuda Pertama tahun 1926.¹⁸ Alih-alih penggantian nama, bahasa Indonesia merupakan inovasi terbaru pada zaman

¹⁸ Salah satu rangkaian pergerakan kebangsaan Indonesia adalah peristiwa Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada tahun 1926 (baca Maryanto, 2011). Peristiwa penting itu dibukukan dalam sejarah *Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda* (Sularto 1986). Dalam buku sejarah itu disebutkan bahwa tepatnya pada 2 Mei 1926 usulan M. Yamin ditanggapi oleh M. Tabrani sebagai berikut. "Kita sudah mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kita sudah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengapa kita harus mengaku bahasa persatuan, bukan bahasa Indonesia?" Tanggapan M. Tabrani itu dikuatkan oleh Sanusi Pane sebagai anggota Kongres: "Saya juga setuju bahasa Indonesia kita lahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini."

kolonialisme. Selanjutnya, Kongres Pemuda Kedua tahun 1928 mengesahkan butir ke-3 Sumpah Pemuda: *Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*. Bahasa Indonesia bermakna 'satu' dalam pengertian *persatuan Indonesia*.

Inovasi terbaru dimaksud dalam bidang kebahasaan pada zaman kolonialisme tersebut dilakukan oleh para tokoh pejuang pergerakan nasional-kebahasaan, antara lain Mohammad Tabrani dan Sanusi Pane sebagai tokoh kunci. Pergerakan sosial-kebahasaan pada abad XX itu merupakan bentuk kesinambungan dari peristiwa kebahasaan yang menjadi pengalaman empiris Frederick de Houtman pada abad XVII. Itulah sebabnya mengapa bahasa Indonesia merupakan satu bagian penting pada masa perjalanan bangsa Indonesia untuk bergerak membentuk jati diri melalui perjuangan pembebasan dirinya dari belenggu bangsa asing. Jelaslah bahwa duel satu lawan satu di atas geladak kapal pada 11 September 1599 merupakan kisah perjuangan bangsa yang berujung dengan cerita tewasnya Cornelis de Houtman di tangan Laksamana Malahayati (Keumalahayati).

Di balik peristiwa heroik itu juga terdapat cerita suksesnya Frederick de Houtman. Penyusunan kitab pengetahuan kebahasaan pada abad XVII itu terbilang paling tua sepanjang sejarah pembentukan bahasa Indonesia, sebagaimana diriwayatkan untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/97/ sejarah-kamus-besar-bahasa-indonesia>). Di balik peristiwa kebahasaan itu, berikut adalah pembahasan peran penting dua tokoh kunci—Mohammad Tabrani dan Sanusi Pane—dalam pergerakan sosial-kebahasaan pada masa pembentukan spirit *trigatra bangun bahasa*.

3.3.1 Mohammad Tabrani: Tokoh Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia

Data sejarah bahasa Indonesia menunjukkan bahwa pada Juli 1925 terjadi peristiwa penting untuk dicatat. Pada bulan itu, Mohammad Tabrani—yang terlahir di Pamekasan (Madura) tanggal 10 Oktober 1904 dengan nama lengkap Mohammad Tabrani Soerjowitjito—mulai bekerja pada harian *Hindia Baru*. Dalam kolom *Kepentingan* yang ia asuh di lembaga pers itu, pada tanggal 10 Januari 1926, dimuatlah tulisan dengan judul "Kasihannya". Tulisan itu muncul sebagai gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia.

Ketika itu, M. Tabrani menyebut bahasa Indonesia sebagai *bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggapnya bahasa yang dipakai sebagai bahasa pergaulan oleh bangsa kita kebanyakan*. Konsep kebangsaan yang muncul dari gagasan M. Tabrani tersebut merujuk pada kondisi nyata keberagaman manusia (orang-orang *Indie*) yang masih bersifat kedaerahan/kesukuan dan masih mengutamakan kepentingan suku atau pun daerahnya masing-masing sebagaimana terbentuknya organisasi-organisasi pemuda pada masa itu.

"*Bahasa Indonesia tidak ada; Tabrani tukang ngelamun.*" Demikian petikan dari ucapan Mohammad Yamin yang dicatat dalam karya tulis *Sebuah Otobiografi M. Tabrani: Anak Nakal Banyak Akal* (halaman 42). Dalam tulisan itu, Yamin disebutkan sedang "naik pitam" karena Tabrani menyetujui seluruh pidato Yamin, tetapi menolak konsep usul resolusinya pada Kongres Pemuda Pertama 1926 (butir ketiga: *menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu*). Pada kesempatan itu, M. Tabrani bertindak sebagai Ketua Kongres dan berpandangan sebagai berikut. "Alasanmu, Yamin, betul dan kuat. Maklum lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun, saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini."

Atas perbedaan pendapat antara Yamin dan Tabrani tersebut, kebijaksanaan yang diambil adalah keputusan terakhir itu ditunda sampai dengan Kongres Pemuda Indonesia Kedua pada tahun 1928. Pesan Kongres Pemuda Pertama dititipkan kepada M. Yamin dengan catatan penting bahwa nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Terbukti bahwa *Yamin selaku penulis dalam Kongres Pemuda Kedua menunaikan tugasnya dengan baik*. Kongres Pemuda Kedua (Sugondo Joyopuspito sebagai Ketua Kongres) tidak membicarakan usul Yamin tersebut dalam rapat panitia, tetapi langsung membawanya dalam sidang umum dan Kongres menerima usulan Yamin dengan suara bulat. "Kebulatan Tekad Pemuda" (dalam istilah Sanusi Pane atau "Ikrar Pemuda" dalam konsep Yamin) dikenal hingga sekarang sebagai Sumpah Pemuda.

Data sejarah bahasa Indonesia juga diperoleh dari tulisan Priantono Oemar "Lamunan Tabrani yang tak sia-sia" yang diterbitkan pada harian *Republika* (edisi Jumat, 12 Juli 2019). Melalui tulisan itu, data kebahasaan ini begitu penting untuk membuat ingatan kolektif bangsa ini segar kembali akan

sepak terjang M. Tabrani untuk menggelorakan gerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. “*Bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu! Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu!*” Demikianlah gelora Tabrani sebagaimana ia tuliskan sendiri dalam koran *Hindia Baru* (edisi 11 Februari 1926) pada kolom *Kepentingan* yang dengan penuh keberanian diberikan judul “Bahasa Indonesia”.

Penerbitan bahasa Indonesia itu disebutkan bertujuan agar *pergerakan persatuan anak-Indonesia akan bertambah keras dan cepat. Jika kita membuatnya bahasa itu bahasa Melayu, salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat [pikiran dan tindakan] imperialisme dari bahasa Melayu terhadap (kepada) lain-lainnya atas bahasa pada bangsa kita di sini.* Begitulah sikap tegas M. Tabrani yang terungkap pada kolom *Kepentingan* tersebut. Pada bagian akhir kolom itu, Tabrani menutup tulisannya: *karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air-kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak-Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia.* Sebagai penutup kolom, disebutkan nama penulis: Tabrani D.I. Penggunaan singkatan nama D.I. itu dijelaskan secara terpisah: bukan nama organisasi *Darul Islam*, melainkan *Dienaar Indie*: “Abdi Indonesia”.

Dalam kaitan dengan perjuangan nasional-kebahasaan yang dilakukan M. Tabrani, penting untuk dicatat bahwa ada satu tahap perencanaan bahasa/*language planning*, seturut model Haugen, yaitu seleksi. Setelah itu, ada tahapan berikutnya: kodifikasi, implementasi, dan elaborasi. Dalam kaitan itu, M. Tabrani tampak sangat selektif untuk menentukan pilihan pada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, tidak pada bahasa lain selain yang bernama Indonesia. Dalam kaitan itu pula, dapat dicatat pula di sini bahwa hasil gemilang yang tak-terbilang atas perjuangan gagasan M. Tabrani ini tidak hanya berbentuk seleksi bahasa apa yang digunakan sebagai bahasa persatuan, tetapi juga berwujud nyata penggunaan bahasa Indonesia. Atas gagasannya tentang bahasa persatuan ini, tokoh M. Tabrani telah berhasil diusulkan agar menjadi pahlawan nasional.¹⁹

Fakta kebahasaan menunjukkan bahwa peristiwa perjuangan elaborasi penggunaan bahasa Indonesia sangat gigih geliatnya dengan bermula dari Volksraad: Dewan Rakyat, yang turut mendukung Kongres Bahasa Indonesia (KBI) Pertama di Solo pada tahun 1938. Pada saat berlangsungnya KBI itu M. Tabrani pun membuat prasaran “Penyebaran Bahasa Indonesia”. Sementara itu, untuk melembagakan bahasa persatuan Indonesia, prasaran “Institut Bahasa Indonesia” diusung oleh Sanusi Pane: tokoh orang yang menopang pendirian Tabrani dalam perdebatan dengan Yamin pada 2 Mei 1926 ketika gagasan bahasa (persatuan) Indonesia dibuat dalam Kongres Pemuda Pertama.

3.3.2 Sanusi Pane: Tokoh Penggerak Bahasa Persatuan Indonesia

Telah disebutkan bahwa pada 2 Mei 1926 terjadi kemacetan atas gagasan bahasa persatuan Indonesia yang diusung oleh M. Tabrani. Dalam perdebatan dengan Yamin itu, gagasan yang telah memperoleh persetujuan dari Sanusi Pane (dengan skor 2:2 antara kubu pemikiran M. Yamin dan M. Tabrani) pada akhirnya dapat diteruskan dalam pergerakan sosial-kebahasaan lebih lanjut. Sanusi Pane adalah tokoh penggerak bahasa persatuan Indonesia. Tanpa kehadirannya, dapat dipastikan bahwa gagasan M. Tabrani itu akan sulit dimajukan.

Data kebahasaan dalam kaitan dengan kehadiran tokoh Sanusi Pane tersebut menarik untuk dicatat dalam kerangka model perencanaan bahasa (Haugen, 1959). Ketokohan Sanusi Pane—seturut isi makalah Haugen yang bertajuk “Planning for a Standard Language in Modern Norway”—memberikan pengertian yang selaras dengan makna perencanaan bahasa itu sebagai *usaha untuk*

¹⁹ Sang penggagas bahasa persatuan Indonesia telah wafat pada tanggal 12 Januari 1984. Makam almarhum di TPU Tanah Kusir merupakan situs memori untuk mengenang jasa-jasa M. Tabrani. Tanda jasa Perintis Kemerdekaan telah dianugerahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tanda jasa itu masih perlu ditambahkan. Untuk itu, telah diusulkan penghargaan negara berupa gelar pahlawan nasional kepada M. Tabrani karena gagasan besarnya melahirkan bahasa Indonesia yang mempersatukan beragam manusia: anak bangsa ini! Bahan tulisan yang bertajuk “Sang Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia” ini disajikan pada acara ziarah Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di makam M. Tabrani, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2019. Bahan tulisan ini dapat dibaca melalui laman Badan Bahasa.

membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana (baca Ansari, 2010). Baik M. Tabrani maupun Sanusi Pane melakukan usaha yang terarah secara terus-menerus dengan melihat perkembangan bahasa yang digunakan pada masyarakat Indonesia. Dalam hal konsep perencanaan bahasa ini, perencanaan bahasa dimaksud memang tidak dilakukan semata-mata untuk meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau.

Namun, untuk mengetahui masa depan dan masa lampau bahasa Indonesia, pergerakan sastra Sanusi Pane sangat bermakna guna menjembatani pengetahuan kebahasaan itu dari masa ke masa. Untuk itu, pendekatan eksplanatori telah dijelaskan oleh Abdul Hadi W. M. (2021) dengan mengungkap gema sastra sufi dari Sanusi Pane sampai dengan Sutardji Chalsum Bahri. Pendekatan ini dirunut dari karya dua penulis sufi tersebut secara umum melalui pengalaman kerohanian mereka dalam perjalanan mencari kebenaran atau keadaan jiwa yang dialami dalam menempuh jalan kerohanian di jalan tasawuf atau cinta ilahi.

Selain tokoh penggerak bahasa persatuan Indonesia pada saat perumusan teks Sumpah Pemuda tersebut, Sanusi Pane juga merupakan tokoh teras dalam Pujangga Baru yang menjadi bagian penting dari pergerakan pembentukan bahasa (persatuan) Indonesia. Seturut dengan pandangan Abdul Hadi W.M., pembahasan tentang Pujangga Baru adalah tidak mungkin dilakukan tanpa melihat orientasi kebahasaan dan semangatnya dalam bersastra. Abdul Hadi sependapat dengan para kritikus dalam hal bahwa Sanusi Pane memiliki kecenderungan sufistik yang kuat dalam penulisan puisi. Ini adalah titik tolak penting dalam membicarakan hubungan kepenyairannya dengan tradisi sastra (bahasa daerah) Melayu sebagaimana digemakan oleh penyair sufi Melayu terkemuka pada abad XVI: Hamzah Fansuri.

Yang sangat penting untuk dicatat pada bagian ini ialah bahwa Pujangga Baru merupakan gerakan sastra yang--menurut Abdul Hadi--mendapatkan banyak pengaruh atau ilham dari romantisme Eropa dan sastra sufi atau mistikal Timur. Pengaruh kesusastraan Barat diketahui dengan kehadiran tokoh Faust. Sementara itu, dalam karya sastra Sanusi Pane, kesusastraan Timur diwakili semangatnya dengan menghadirkan pribadi Arjuna dalam cerita *Mahabharata*. Keterwakilan dari dua arah pengaruh asing itu dinyatakan sangat eksplisit bahwa Sanusi Pane mencita-citakan sintesis Barat dan Timur bagi Indonesia.

Di Indonesia, sebagaimana laporan dari hasil kajian Abdul Hadi tersebut, gerakan sastra romantik muncul bersamaan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan hasrat memadukan semangat peradaban Barat modern yang individualistis, pada satu sisi, dan semangat Timur yang religius dan spiritualistis, pada sisi lain. Menurut laporan Abdul Hadi, romantisme modern bertemu dengan tradisi sastra mistik dan sastra sufi yang telah berakar lama dalam peradaban masyarakat Nusantara. Bukan pula suatu kebetulan apabila pertemuan Timur-Barat tersebut nampak dalam karya dua penulis Pujangga Baru terkemuka, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah.

4. Puncak Pembibitan Spirit *Trigatra Bangun Bahasa* di Kota Kuno Barus

Mengapa kota kuno Barus merupakan sebuah puncak pergerakan pembibitan spirit *kebahasaan ini*? Pada bagian di atas telah disebutkan bahwa abad pembentukan *Trigatra Bangun Bahasa adalah antara XVII dan XX*. Abad XVI merupakan masa puncak pembibitan spirit kebahasaan yang dikenal sekarang sebagai bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Dalam hal trigatra ini, bahasa Melayu yang berkembang pada abad XVI diketahui telah mencapai puncak status yang oleh Abdul Hadi W.M. (2002) dinyatakan sebagai “bahasa pergaulan utama penduduk kepulauan Nusantara di bidang perdagangan, keagamaan, dan intelektual.” Hamzah Fansuri—Hamzah dari Barus—diakui di dunia kesusastraan sebagai pencipta pertama syair Melayu (Teeuw, 1994). Puisi khas Hamzah Fansuri dengan empat baris bersajak seperti contoh berikut digemari oleh sastrawan Nusantara sejak abad XVII.

Hamzah Fansuri di negeri Melayu
Tempatnya kapur di dalam kayu
Asalnya manikam di manakan layu
Dengan ilmu dunia di manakan payu

(dikutip dari Ikatan-Ikatan XV dalam Abdul Hadi W.M., 2002; 2020)

4.1 Rekonstruksi kebahasaan ke titik Puncak Peradaban Nusantara di Barus

Dalam buku Yudi Latif yang berjudul *Negara Paripurna* (2024), terdapat pandangan “*Indonesia bukanlah sekadar kelanjutan administratif bekas jajahan Belanda*”. Pandangan ini dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno dalam prolog buku tersebut. Benar bahwa dasar bahasa Indonesia pun masih terlalu dangkal untuk menggambarkan pijakan berbangsa yang satu itu apabila dilihat hanya dari jejak kebahasaan yang ditinggalkan oleh penjelajah atau penjajah asing.

Charlie Hanawalt (2010) telah menawarkan narasi sejarah mengenai praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Menurutnya, sejarah perencanaan bahasa Melayu telah mengawali terbentuknya Indonesia sebagai suatu bangsa berabad sebelumnya. Charlie Hanawalt mengikuti pendapat Grimes (1996) yang menyebutkan bahwa ragam bahasa Melayu merupakan bahasa asli Sumatra dan Semenanjung Malaka yang dilaporkan oleh orang Portugis telah digunakan sebagai lingua franca pada awal tahun 1500-an di belahan timur Indonesia sekarang. Setelah menjadikan ragam bahasa Melayu tersebut sebagai standar tulisan dalam perdagangan dan keagamaan di banyak bagian di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mengakui bahasa Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pada tahun 1865.

Charlie Hanawalt juga menegaskan bahwa peristiwa 28 Oktober 1928 ketika Kongres Pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu merupakan suatu langkah untuk mengukuhkan identitas nasional. Pada saat ini, menurutnya, Pusat Bahasa (sekarang Badan Bahasa) menerima beban tugas yang berat “untuk memimpin perencanaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lain yang dipakai di seluruh Indonesia”. Perencanaan dimaksud ialah perencanaan bahasa terangkai (bahasa Indonesia, daerah, dan asing) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

4.1.1 Dari Belahan Timur Indonesia ke Titik Puncak Peradaban di Barus

Perencanaan bahasa terangkai dalam kondisi kebahasaan di Indonesia itu tentu berkelindan dengan masalah besarnya penduduk (282.477.584 jiwa) pada saat ini. Indonesia merupakan negara keempat yang berpenduduk terbanyak setelah Amerika Serikat (dunia.tempo.co). Kondisi internal negara sebangsa ini tampak makin rumit dengan fakta geografis, sebagaimana terlihat dari data Badan Informasi Geospasia (BIG), bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Keanekaragaman hayati yang melekat pada insan bangsa dalam negara kepulauan ini merupakan tantangan pembangunan kebahasaan.

Tantangan pun makin besar mengingat posisi geostrategis kebahasaan yang berbatasan dengan wilayah negara lain dan dengan praktik perencanaan bahasa yang berbeda. Ihwal tantangan geostrategis ini telah dibahas sebelumnya. Pada bagian ini, akan dibahas respons terhadap tantangan pembangun kebahasaan dengan banyaknya jumlah penduduk dan pulau serta keanekaragaman bahasa daerah. Tantangan itu membawa dampak dalam tata kelola kebahasaan di Indonesia. Dengan merunut data mutakhir (petabahasa.kemdikbud.go.id), pada saat ini terdapat 718 bahasa daerah yang tersebar di wilayah Indonesia. Seturut dengan informasi itu, bahasa daerah yang paling banyak jumlahnya berada di belahan timur Indonesia. Fakta kebinekaan bahasa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa wilayah timur ini merupakan daerah konsentrasi dalam penuturan bahasa purba, yaitu Austronesia, yang lebih bersifat “asali”.

Seluk beluk bahasa (persatuan) Indonesia merupakan pengetahuan akademis yang dapat diperoleh melalui jejak genetik-kehidupan/DNA manusia yang berbangsa Indonesia. Pembuktian ilmiah telah banyak dilakukan, antara lain, dengan temuan ilmiah (sementara) yang menunjukkan keyakinan/kebenaran atas adanya jejak manusia Austronesia pada zaman purba sebagai sumber kehidupan awal bersatunya (bangsa) Indonesia. Berikut adalah gambar yang mengilustrasikan jejak asal mulanya bahasa Indonesia atau yang tertulis namanya “Indonesian” dalam bahasa (asing) Inggris (<https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/>).



Gambar/peta kebahasaan di atas diambil dari laporan hasil survei seratus bahasa yang berpenutur terbanyak sedunia (Imam Gosh, 15 Februari 2020). Hasil survei itu melaporkan bahwa bahasa Indonesia menduduki peringkat kesepuluh dengan catatan sumber kemuasalannya dari bahasa Austronesia. Dilaporkan pula bahwa bahasa Indonesia adalah mirip dalam hal perencanaan pemerolehannya dengan bahasa Swahili yang mencapai angka penuturan 82% sebagai bahasa kedua. Dengan angka penuturan 78% sebagai bahasa kedua dari total keseluruhan sekitar 200 juta penutur, bahasa Indonesia merupakan varian bahasa Melayu yang secara spesifik disebutkan *Melayu (Selat) Malaka*: “[...] *this variation on the Malay language has been used as the lingua franca across the islands for a long time*”.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa konsolidasi kebahasaan secara internal disarankan gerakannya melalui *rekonstruksi bahasa demi sesama bangsa* (Maryanto, 2024).²⁰ Bagaimana tata letak dasar bahasa Indonesia pada masa pergerakan nasionalisme purba? Pertanyaan ini tersirat dalam pandangan Franz Magnis-Suseno yang memuat pentingnya rekonstruksi pembibitan bahasa persatuan Indonesia. Demi sesama bangsa yang bermaujud Indonesia, bahasa persatuan sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda 1928 itu masih perlu direkonstruksi atau ditata ulang pada dasarnya untuk meletakkan landasan berpikir tentang negara bangsa yang paripurna ini.

Jejak historis tersebut—sekalipun penting dan menarik—tentu belum memadai untuk dijadikan data kebahasaan guna mendeskripsikan bahasa Indonesia sebagai dasar kebangsaannya. Dengan melakukan pengamatan atau observasi kebahasaan yang memadai terhadap keberadaan “komunitas pengalaman bersama” di kawasan Nusantara, kepada deskriptif (*descriptive adequacy*) dapat diperoleh atas fakta bahasa yang bekerja pada atau dipekerjakan oleh komunitas dimaksud sejak bergeraknya nasionalisme purba. Atas dasar kebahasaan ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta keberadaan bangsa Indonesia yang jauh mendahului keberadaannya.

Selain begitu pentingnya peran beragam bahasa asing yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, dalam rangka menemukenali keberadaan bahasa Indonesia, juga terdapat aneka bahasa daerah yang tidak kalah pentingnya untuk menelusuri landasan bahasa persatuan ini pada masa purbanya. Keanekaagaman bahasa daerah ini dapat dilihat kesamaannya melalui pembuktian secara empiris, antara lain, dari keberagaman atas ekspresi kepemilikan *-nya* dalam bahasa Indonesia. Keberagaman dimaksud benar-benar ada sebagaimana penggunaan bentuk kepemilikan *ni* dalam bahasa Tarfia dan Tobati di Papua serta bahasa Alor di Nusa Tenggara Timur. Makin kaya keberagaman itu dengan bentuk *ne* dalam bahasa Dubu, *de* dalam bahasa Namblong, *ge* dalam bahasa Gresi, dan *gi* dalam bahasa Kafoa di Papua (baca Mahsun, 2010: 199—202).

Semua variasi bentuk bahasa daerah (di) Indonesia merupakan refleksi konstruksi dari satu sumber bahasa purba **nia* dalam hal pengungkap milik (Nothofer, 1990 dalam Mahsun, 2010: 198). Peran bahasa daerah tersebut tentu sangat sentral dalam merekonstruksi penyangga bahasa negara bangsa ini atas dasar bahasa purbanya, terutama atas kekayaan bahasa daerah pada ujung timur Nusantara di Papua. Konstruksi dasar bahasa Indonesia tersebut telah berhasil ditemu-kenali dalam bahasa (purba) Austronesia atau—lebih lazimnya—bahasa Proto-Austronesia yang disingkat sebagai PAN yang ditemukan bersumber langsung dari atau berkerabat dekat dengan bahasa(-bahasa) Trans-Papua.

Telah diketahui bahwa masyarakat/guyub bahasa Indonesia teridentifikasi atas dua kelompok terbesar, baik penutur bahasa-bahasa PAN maupun Trans-Papua, yang terbukti telah mengalami proses baur padu pada masa bergeraknya nasionalisme purba secara kebahasaan. Bahasa Austronesia dihipotesiskan telah hidup sebagai bahasa kerja bersama pada 4.000-an tahun silam. Hipotesis itu baru-

²⁰ Saran ini ditulis dalam artikel “Bahasa dan Negara Paripurna: Merunut Akar Pemikiran Yudi Latif” yang pada tanggal 30 September 2024 diunggah pada laman Badan Bahasa (<https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/artikel-detail/4396/bahasa-dan-negara-paripurna:-merunut-akar-pemikiran-yudi-latif>).

baru ini dibuktikan oleh Aron M. Mbetete dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024 dengan mengungkap kemiripan/kesamaan bentuk dan makna asal pada kata yang berkerabat dalam bahasa PAN dengan bahasa Trans-Papua.

Dari informasi yang disajikan dalam pertemuan ilmiah di BRIN itu, percontohan data kebahasaan dapat diambil, antara lain, dalam bentuk kata *one* ‘rumah’ pada bahasa Lio di daerah Flores yang mirip dengan kata *honey* ‘rumah’ di Papua. Kaji-banding kebahasaan pun terbuka untuk leksikon nama asli (orang dan toponimi) seperti kata *wangge* yang dapat dibandingkan dengan kata *wanggai* di Papua. Dalam kaji-banding sejarah bahasa itu, Mbetete mengungkap kembali pandangan Fishman (1968) yang menyebutkan bahwa nasionalisme kebahasaan di Indonesia disangga sangat kuat dengan keberadaan bahasa daerah beserta unsur susastra.

Aron M. Mbetete telah mengonfirmasi adanya relasi kekerabatan para penutur bahasa moyang dari turunan PAN dengan sedemikian pula dekatnya relasi itu dari turunan bahasa Trans-Papua purba. Menurut hasil kajian Mbetete, semua bahasa yang hidup dan pernah hidup dapat dipastikan “*menyatu dengan manusia sebagai makhluk yang berbicara dan bergerak [bermigrasi] bebas ke mana-mana*”. Oleh karena pergerakan atau perpindahan manusia itu, maffhumlah rakyat Indonesia merupakan komunitas/masyarakat majemuk dan multi-agama di belahan bumi yang disebut-sebut sebagai kawasan Nusantara atau—oleh penulis Barat—secara luas dikenalnya sebagai Hindia Timur atau—lebih spesifiknya—Hindia Belanda.

4.1.2 Barus sebagai Titik Puncak pada Arus Balik Peradaban Nusantara

Di dalam buku *Negara Paripurna* Latif (2024), dijelaskan pula bahwa apa yang disebut sebagai Nusantara (yang berkeindonesiaan sebagai satu negara bangsa) adalah sebuah wilayah geografis dan sosiologis yang pada 8000 Sebelum Masehi sudah melimpah kekayaan alamnya untuk memakmurkan penghuni bumi. Berlimpahnya kekayaan Nusantara itu menimbulkan migrasi penduduk melalui kegiatan perdagangan yang mencapai puncak masa tuanya dari masa pergerakan nasionalisme purba itu pada abad ke-16 ketika pedagang Eropa memasuki kawasan Nusantara. Pada abad dimulainya pergerakan nasionalisme modern inilah terjadi transformasi sosial-kebahasaan yang menuju terbentuknya konstruksi dasar untuk berpikir paripurna tentang tiga jenis bahasa: Indonesia, daerah, dan asing.

Pada bagian ini ditegaskan kembali bahwa demi terwujudnya sesama bangsa Indonesia, bahasa Indonesia selama masa pergerakan nasionalisme modern perlu dilihat konstruksi dasarnya dari transformasi sosial-kebahasaan atas bahasa asing (Arab, Inggris, Belanda, dan lain-lain) yang dibentuk oleh dan—sekaligus—membentuk bahasa (persatuan bangsa) Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah yang dikenal sekarang ini juga bertransformasi dari landasan bahasa purbanya. Konstruksi dasar kebangsaan itu semuanya tertelusur dengan narasi pergerakan nasionalisme secara kebahasaan pada masa purba hingga masa tuanya, dengan sebuah titik temu pergerakan sosial itu di Barus (sekarang sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah).

Bagian ini hendak menegaskan bahwa melalui jalan internalisasi dalam prinsip kebangsaan Indonesia, pengakuan dan pemuliaan hak dasar warga bangsa Indonesia telah dilakukan secara nyata dengan melestarikan bahasa daerah. Seturut dengan alam pemikiran Pancasila, untuk menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh, diperlukan landasan yang merupakan prasyarat persaudaraan universal. Ihwal pentingnya landasan persaudaraan yang berkeindonesiaan itu dinyatakan oleh Yudi Latif sebagai berikut.

Jalan internalisasi atas nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut membuat Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan Indonesia yang berasal dari kebinekaan masyarakat Indonesia ini diwujudkan berdasarkan konsepsi kebangsaan yang diekspresikan dengan bahasa persatuan dalam keragaman bahasa daerah dan keragaman bahasa daerah dalam bahasa persatuan, seturut dengan slogan bernegara yang dinyatakan dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika.”

Pada sisi internalisasi itu, wawasan pluralisme berkembang pesat dalam alam pemikiran Pancasila yang senantiasa menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, termasuk bahasa daerah yang berbeda-beda, sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Semua ruang keberbedaan

itu terisi dengan nilai keutamaan satu bahasa kebangsaan Indonesia dan kelestarian segala bahasa daerah yang ada di wilayah Indonesia.

Sekadar untuk ilustrasi pelestarian bahasa daerah yang tengah berlangsung, sebutlah sekarang bahasa (daerah) Kaili di Sulawesi Tengah. Bahasa daerah ini merupakan modal sosial untuk kerja bersama guna menjadikan sesama masyarakat Kaili, antara lain melalui kekayaan ungkapan/peribahasa seperti *nangelo belo* ‘mencari baik’ dan *belo rapovia belo rakava* ‘baik dibuat baik didapat’. Nilai dasar kehidupan sosial ini tentu merupakan karakter masyarakat daerah Kaili yang setiap warganya diharapkan dapat selalu berbuat kebaikan agar kebaikan pula yang didapatkan. Atas dasar hasil telaah kebahasaan, sebagaimana dipaparkan oleh Deni Karsana dalam webinar BRIN pada 29 Mei 2024, bahasa daerah negara ini diketahui berasal dari induk bahasa Austronesia yang berkembang biak dan tersebar luas dalam subrumput Melayu Polinesia di Sulawesi Tengah. Fakta kebahasaan seperti itu menunjukkan bahwa bahasa daerah negara Indonesia telah ada jauh sebelum berkembangnya bahasa Melayu-Arab di Barus pada masa pembibitan bahasa (negara persatuan) Indonesia. Bahasa (purba) Melayu Polinesia itu dapat dikonfirmasi telah hidup secara berkelanjutan dari bahasa Austronesia yang dapat direkonstruksi dasar kekerabatannya dengan bahasa Trans-Papua purba. Rekonstruksi kebahasaan ini menunjukkan bahwa Barus merupakan titik puncak pada arus balik peradaban nusantara.

4.2 Kisah Kemenyan dan Kapur Barus dalam Teks Cerita Keagamaan

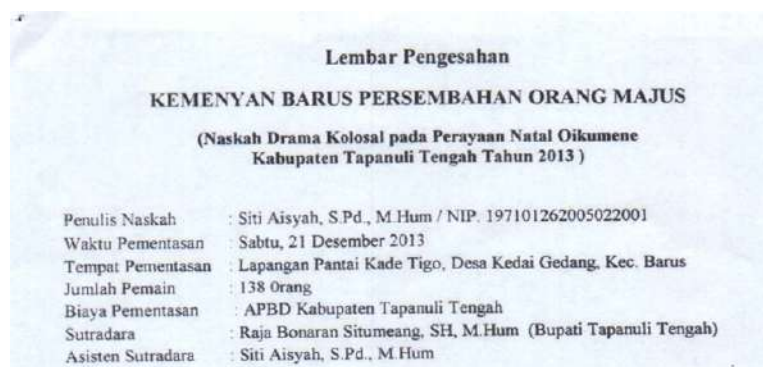
Fakta bahwa Barus merupakan titik puncak pada arus balik peradaban nusantara tersebut memberikan petunjuk adanya unsur bahasa asing juga—selain bahasa daerah—dalam pembibitan bahasa (persatuan) Indonesia. Unsur bahasa asing dalam bahasa Indonesia dapat diketahui dari jejak sejarah kemenyan dan kapur barus dalam konteks teks cerita keagamaan Nasrani dan Islam.

4.2.1 Kisah Kemenyan Barus dalam Agama Nasrani

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *Nasrani* didefinisikan sebagai sebutan untuk pengikut agama Kristen. Seturut definisi kamus itu, istilah *Nasrani* juga merupakan sebutan untuk sekte Yahudi pengikut Yesus Kristus yang masih berpegang pada hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Dalam kaitan itu, terdapat kisah tiga orang Majus yang membawa tiga hadiah ketika orang itu mencari bayi Yesus yang baru lahir. Tiga hadiah yang mereka bawa adalah emas yang menjadi lambang keagungan Yesus sebagai Raja, (2) kemenyan sebagai lambang keagungannya sebagai Imam Agung, dan (3) mur yang menjadi lambang pengorbanan dan penebusan dosa yang diyakini kelak akan dilakukan Yesus.²¹

Makalah ini memanfaatkan data kebahasaan yang diperoleh secara langsung dari kisah kemenyan Barus dalam sebuah sumber cerita keagamaan tersebut. Teks cerita ditulis oleh Siti Aisyah, S.Pd., H.Hum.. Perolehan data dari naskah cerita ini sangat berharga untuk mengetahui bahwa tidak hanya terdapat kisah kemenyan Barus dalam cerita persembahan orang Majus pada saat kelahiran Yesus. Akan tetapi, data kebahasaan ini juga memberikan petunjuk bahwa telah terjadi kontak bahasa antara bangsa Indonesia dan bangsa Yahudi. Berikut adalah bukti lembar pengesahan naskah cerita tersebut dan pengesahannya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

²¹ Bahan cerita ini dapat dibaca dalam artikel "Mengapa Kemenyan Menjadi Persembahan Penting Untuk Yesus?" (https://www.jawaban.com/read/article/id/2023/12/14/518/231214143944/mengapa_kemenyan_menjadi_persembahan_penting_untuk_yesus)



Kisah kemenyan Barus telah dibuat dalam bentuk seni drama yang berisi cerita tentang kemenyan persembahan orang Majus kepada bayi Yesus. Cerita persembahan ini dihubungkan dengan fakta sejarah terjadinya aktivitas barter pada ribuan tahun silam di kota bandar laut, Barus, yang sangat terkenal di berbagai penjuru dunia. Berbagai suku bangsa, termasuk bangsa India, datang dan bermukim di wilayah kota kuno Barus.

Sinopsis: Kisah di dalam drama ini semacam penemuan benang merah antara kemenyan Barus dengan kemenyan persembahan orang Majus kepada bayi Yesus. Dimulai dengan aktivitas barter yang terjadi di kota bandar Barus ribuan tahun silam dengan pelabuhannya yang terkenal di berbagai penjuru dunia. Dikisahkan bahwa wilayah Barus Raya terkenal sebagai penghasil kapur barus dan kemenyan yang sangat mahal harganya hingga sampai ke tangan para raja (termasuk Raja Salomo), para imam serta para bijak bestari. Berbagai suku bangsa datang dan bermukim di wilayah Barus raya, termasuk bangsa India yang sejak enam ribu tahun silam membentuk sebuah koloni dagang di Lobutua, Barus. Apa yang diperdagangkan? Salah satu yang terbesar adalah kemenyan. Bangsa India yang ada di Lobutua inilah yang teridentifikasi sebagai salah satu orang Majus bernama Kaspar. Begitu melihat bintang Bethlehem muncul, yakinlah ia bahwa "Sang Raja" telah lahir. Bersama kelompoknya Kaspar bergerak mengikuti arah bintang tersebut. Demikian pula hal yang dilakukan oleh dua tokoh Majus dari tempat lain yaitu Melkior dari Cina dan Baltasar dari Arabia. Mereka bertemu dan bersatu dalam perjalanan hingga sampai ke Yerusalem dan lewat serangkaian peristiwa sampailah mereka di Bethlehem dan menemui "Sang Raja" yang baru dilahirkan. Dengan rasa haru dan suka cita hadiah pun dipersembahkan kepada bayi yesus, yaitu emas dari Melkior, kemenyan dari Kaspar, dan mur dari Baltasar.

4.2.2 Kisah Kemenyan Barus dalam Agama Islam

Teori tentang sebaran agama Islam ke Indonesia menyatakan bahwa Islam tersebar dari India. Dari teori itu, belum diketahui secara pasti proses awal terjalannya *kontak bahasa* (dalam istilah sosiolinguistik) antara Indonesia dan India. Namun, proses awal itu dapat ditelusuri melalui sejarah Barus sebagai gerbang agama-agama Nusantara (Hindu, Yahudi, Ru-Konghucu, Islam, dan Nasrani) sebagaimana dipaparkan Rusmin Tumanggor pada 15 Oktober 2019 dalam forum seminar MUI Sumut. Dalam

makalah untuk forum itu disebutkan bahwa Barus merupakan gerbang masuknya agama Hindu ke Nusantara dengan penjelasan Tumanggor sebagai berikut.

- (1) Barus berada di Pantai Barat Sumatera pada posisi (geologi) yang berhadapan secara langsung dengan Lautan Hindia (Samudera Indonesia). Oleh karena itu, hubungan India dengan Barus melalui pelayaran atau jalur laut telah berlangsung jauh sebelum Masehi.
- (2) Meskipun di Aceh, khususnya di wilayah Banda Aceh, terdapat situs peninggalan Hindu, dalam penulisan sejarah, Olelehue, Lamuri, belum pernah tertulis waktunya sebelum Masehi. Namun, lebih banyak tulisan tentang bandar Barus.
- (3) Hingga sekarang masih terdapat penganut agama Sipele Sumangot (organisasinya: Pabas) dengan eksistensi rumah ibadah (*jabu parsattian*) di Kampung Bulu Duri, Barus dan pola peribadatan yang mirip dengan Hindu di Bali.
- (4) Penganut agama Sipele Sumangot memiliki keyakinan yang sama dengan Hindu, yaitu keyakinan teologis (Dewa/Tuhan/*Debata Opputta Mula Jadi Na Bolon*) yang berasal dari nenek moyang tertua (animisme) dan benda alam yang mempunyai roh (dinamisme).
- (5) Terdapat catatan yang dipakai oleh *datu-datu* mantra (*tabas*) dan jampi (*tonggo*) yang berisi ajaran kepercayaan agama Hindu (animisme dan dinamisme) dalam proses pengobatan (dalam konsep Muslim: rangkaian tata cara/ritual doa Muslim).

Berdasarkan temuan Tumanggor pada butir 1 sampai dengan 5, diketahui bahwa ajaran agama Hindu di India--ketika masuk ke Nusantara atau sebelum terbudayakan dan berperadaban tinggi di Bali--lebih dahulu mengalami perkembangan peradabannya melalui Barus. Dalam perkembangan ajaran ini terjadi perubahan pada sejumlah wilayah domain teologi, ritual, dan hari-hari besarnya. Kitab suci Hindu di Bali bernama "Manudharma Casta-Veda Smirti" dan kitab suci Sipele Sumangot bernama "Pustaha" atau yang kadang dinamai "Pustaha Batak". Ditemukan pula bahwa baik suku bangsa Batak maupun suku bangsa Bali sama-sama memiliki aksara sebagai salah satu pertanda memiliki era ketuaan peradaban yang tinggi.

Pada kedalaman tertentu, penjelajahan kosakata *kapur barus* telah dapat dilakukan langkah awalnya guna menyambung mata rantai kebahasaan yang tampak terputus di seputar kawasan Selat Malaka itu dengan episentrum pembibitan bahasa Indonesia di Barus. Ini tentu demi keluhuran bahasa Indonesia, di samping kemuliaan bahasa daerah dan bahasa asing yang semuanya diakui seturut konstitusi Indonesia.

"Satu-satunya kosakata bahasa Indonesia/(Melayu) yang dimasukkan Allah dalam Alquran [Al-Qur'an] dan Hadis adalah konsep *kafuuran* yang bisa diartikan 'kapur barus'." Begitulah kisah kapur barus dalam temuan ilmuwan (Rusmin Tumanggor, 2019) yang memberikan petunjuk empiris betapa jauh jelajah kosakata khas bahasa Indonesia dari bumi Nusantara ke dunia (bahasa) Arab. Selain dalam bahasa Arab terdapat kata *kafuuran*, juga dalam bahasa Latin terkenal kata *champora*. Temuan ilmiah ini tentu bermakna ganda seperti berikut.

- (1) Jelajah kosakata *kapur barus* menunjukkan perkembangan awal bahasa Arab—demikian pula bahasa lain (dari luar wilayah Nusantara yang berkeindonesiaan)—dalam dinamika peradaban bangsa hingga diakuinya jenis bahasa asing ini dalam konstitusi Indonesia.
- (2) Jelajah kosakata *kapur barus* menunjukkan perkembangan awal bahasa Melayu—demikian pula bahasa lain (dari dalam wilayah Nusantara yang berkeindonesiaan)—dalam dinamika peradaban bangsa hingga diakui jenis bahasa daerah ini dalam konstitusi Indonesia.
- (3) Jelajah kosakata *kapur barus* menunjukkan perkembangan awal bahasa Indonesia—pada siklus pembibitan bersama dengan bahasa daerah dan asing—dalam dinamika peradaban bangsa hingga diakuinya bahasa nasional dan resmi negara dalam konstitusi Indonesia.

Langkah awal penjelajahan kosakata *kapur barus* telah memperoleh panduan dari Bappenas (2023) yang membuat daftar DNA sastra bangsa Indonesia dengan menempatkan tokoh sastra Melayu Barus—Hamzah Fansuri (abad XVI—XVII)—pada urutan pertama sebelum Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Penggunaan kata *fansur* yang melekat pada nama sastrawan terkemuka dari kesultanan Aceh ini merujuk kota Barus sebagai pusat perdagangan dunia rempah-rempah pada masa silam, khususnya komoditas *kemenyan* dan *kapur barus*. Perdagangan komoditas ini sudah dikenal pada zaman Nabi Musa.

4.3 Pemancangan Papan Cerita tentang Sastrawan Barus-Hamzah Fansuri

Perlu langkah lebih lanjut untuk menjelajahi perkembangan kosakata khas Indonesia *kapur barus*. Kepentingan strategis untuk menempatkan Barus sebagai episentrum pembibitan bahasa Indonesia ialah demi kepastian bahwa bahasa identitas yang dibawa terbang menjulang ke angkasa ini berakar kuat dalam jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, ikhtiar diperlukan agar tidak mudah diklaim bahwa akar kuatnya bahasa Indonesia ada pada negara tetangga. Untuk itu pula, sebuah papan cerita (*storynomics*) tentang sastrawan Barus-Hamzah Fansuri telah dipancarkan di dekat Jembatan Hamzah Al-Fansuri pada Selasa, 23 November 2021.

Pemancangan papan cerita ini dilakukan secara resmi oleh Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbudristek, Dr. Muhammad Abdul Khak, M.Hum.) dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Maryanto, M.Hum, beserta rombongan (dari beragam unit kerja) di sekitar jembatan Fansuri Barus. Berita pemancangan tersebut ditulis, antara lain, oleh ANTARA melalui laman:

<https://sumut.antaraneWS.com/berita/440797/hamzah-fansuri-sastrawan-barus-pada-masa-pembibitan-bahasa-persatuan-indonesia> (sumber ini diunduh pada 28/04/2025, pukul 1:45).

Hamzah Fansuri sastrawan Barus pada masa pembibitan Bahasa persatuan Indonesia

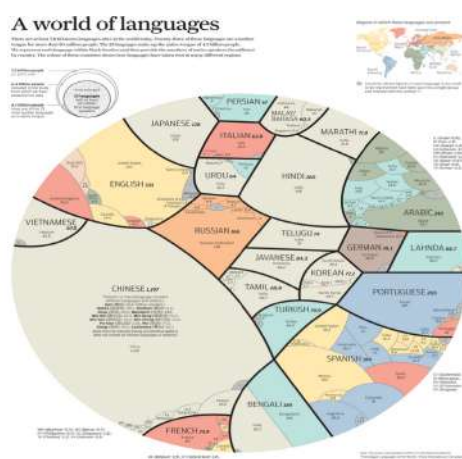
© Rabu, 24 November 2021 1:39 WIB 4163



Turut hadir dalam rombongan yang menyaksikan pemancangan papan cerita itu adalah Dwi Sutana (Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara), Muhammad Luthfie Baihaqi (Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan), Arie Andrasyah Isa (Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Utara), dan Eva Krisna (Kepala Kantor Bahasa Lampung). Turut hadir pula Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Darwin Sitompul), Ketua DPRD Tapteng (Khairul Kiyeni Pasaribu), Wakil Ketua DPRD Tapteng (Willy Sahputra Silitonga), Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tapteng (Boy Hasibuan), dan Kadis Kominfo Tapteng, serta para pimpinan organisasi pemerintahan daerah (OPD) Pemkab Tapanuli Tengah yang lain, selain tokoh masyarakat Barus dan warga masyarakat setempat. Peresmian papan cerita berlangsung atas hasil kerja sama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek).

D. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sebagai penutup, makalah ini hendak menyampaikan kesimpulan bahwa masih terdapat kesulitan teknis untuk melakukan praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia. Kendala teknis itu merujuk pada fakta bahwa dunia kebahasaan (*world of languages*) belum secara spesifik mengakui keberadaan bahasa (persatuan) Indonesia. Di atas telah diuraikan bahwa masalah praktik perencanaan status bahasa, yaitu Indonesia, daerah, dan asing—perlu dicari solusi alternatifnya. Permasalahan praktis itu ialah bahasa Indonesia belum dibedakan secara linguistik dari bahasa Melayu sebagai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Kesulitan praktik tersebut tampak pada gambaran dunia kebahasaan sebagai berikut.



Betapa pun pentingnya dalam praktik kehidupan berbahasa di Indonesia, bahasa Arab—begitu pula bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa lain sejenisnya—direncanakan tetap berstatus sebagai bahasa asing yang telah dikuasai sejak jejaknya berabad silam. Jejak penguasaan bahasa asing—sebagaimana hasil penelusuran DNA sastra bangsa Indonesia dari Barus melalui pemanfaatan data kebahasaan Melayu pada era kesusastraan Hamzah Fansuri (akhir abad XVI)—merupakan satu hal temuan penting untuk memperkuat spirit gerakan *trigatra bangun bahasa: utamakan bahasa Indonesia; lestarian bahasa daerah; (dan) kuasai bahasa asing*. Gerakan pembangunan kebahasaan itu merupakan tindakan manifestasi praktis yang dilakukan oleh para linguis—seturut dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan—sebagai bentuk penerapan teori linguistik mengenai perencanaan bahasa terangkai di Indonesia.

Bahasa Indonesia secara khusus dilakukan *pembedaan (differentiation)* dalam hal perencanaan statusnya sebagai bahasa persatuan bangsa dan negara Indonesia. Namun, dalam hal status legal dan fungsional ini, bahasa Indonesia tidak pernah dibuat *pemisahan (separation)* dengan bahasa-bahasa lain: baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Dalam hal ini, praktik pembinaan bahasa Indonesia dan peningkatan status fungsionalnya untuk menjadi bahasa internasional masih memunculkan permasalahan yang amat kompleks. Di sini telah dilakukan identifikasi permasalahan itu dalam kaitannya dengan bagaimana kesinambungan praktik perencanaan bahasa terangkai di Indonesia dan bagaimana pula dua bahasa—Indonesia dan Melayu—tidak dipisahkan keberadaannya masing-masing, tetapi keduanya dibedakan secara linguistis.

Makalah ini telah menyajikan fakta/data kebahasaan yang menunjukkan bahwa permasalahan bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan bahasa Melayu itu muncul pada abad pembentukan (formasi) tiga jenis bahasa tersebut hingga abad konsolidasi *trigatra bangun bahasa* (dari awal abad XXI). Kompleksitas keterhubungan bahasa Indonesia dengan bahasa lain-lain, terutama dengan bahasa Melayu dalam keanekaragaman variasinya di wilayah NKRI, telah terurai melalui manifestasi praktik perencanaan bahasa terangkai itu. Untuk itu, secara metodologis, makalah ini menawarkan solusi alternatif dengan menghimpun data kebahasaan atas panduan dua unsur universal: dimensi ruang dan waktu. Dari dimensi ruang pergerakan sosial-kebahasaan ini, bahasa Indonesia adalah cara pandang atau orientasi manusia Indonesia atas keberadaan jati diri dan bahasa yang memiliki ciri *khulki (melekat)* atau tak-berjarak dengan dirinya. Dari perspektif bahasa daerah tersebut, manusia Indonesia bergerak dari kawasan timur sebagai wilayah pembauran bahasa antara Austonesia dan Trans-Papua. Pola bunyi /a-a/ merupakan ciri linguistik yang sangat khas melekat pada bahasa persatuan Indonesia dari sumber bahasa (purba) Austronesia itu.

Lebih lanjut, dalam perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain, pergerakan peradaban bangsa Indonesia tersebut mencapai puncaknya di kawasan barat dengan titik balik peradaban purba di Barus melalui bahasa perdagangan (*lingua franca*) atas perniagaan komoditas kemenyan dan kapur barus. Makalah ini telah menjelaskan tidak hanya adanya perkembangan bahasa perdagangan itu, tetapi juga bahasa (ilmu) pengetahuan sebagaimana terungkap dalam kesusastraan Melayu Barus pada puncak abad pembibitan bahasa Indonesia (akhir abad XVI). Bentuk kesinambungan dari praktik narasi sejarah bahasa ini ialah adanya fakta/data kebahasaan pada awal abad pembentukan bahasa Indonesia di Aceh

(XVII) ketika terbit kitab pengetahuan kebahasaan dalam bentuk kamus latin Frederick de Houtman (1603) dan puncak-puncak pembentukannya pada abad XX.

Dengan mengungkap spirit kebahasaan dari Barus, praktik perencanaan bahasa terangkai pada era kekinian menandai pentingnya abad konsolidasi kebahasaan yang dimulai pada awal abad XXI. Itulah linguistik Indonesia: dulu, kini, dan nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Yudi. 2020. *Pendidikan yang Berkebudayaan: Hostori, Konsepsi, Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2024. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Cetakan Kesepuluh)*. Jakarta: Gramedia.
- Madjid, Nuscholish. 2004. *Indonesia Kita (Cetakan Keempat)*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Mahsun, 2010. *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tumanggor, Rusmin. 2017. *Gerbang agama-agama nusantara (Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam & Nasran): Kajian Antropologi Agama dan Kesehatan di Barus*. Depok: Komunitas Bambu.